

**PENGARUH JUMLAH ANGGOTA DPRD, JUMLAH ANGGARAN
BELANJA DAERAH, BIMBINGAN TEKNIS, PENDIDIKAN
KEPALA DAERAH, DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**



SKRIPSI

Oleh :

Viana Dewi Noor Khasanah

19312252

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN JUDUL
PENGARUH JUMLAH ANGGOTA DPRD, JUMLAH ANGGARAN
BELANJA DAERAH, BIMBINGAN TEKNIS, PENDIDIKAN
KEPALA DAERAH DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Viana Dewi Noor Khasanah

19312252

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

Penulis,



(Viana Dewi Noor Khasanah)

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH JUMLAH ANGGOTA DPRD, JUMLAH ANGGARAN
BELANJA DAERAH, BIMBINGAN TEKNIS, PENDIDIKAN
KEPALA DAERAH DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

Viana Dewi Noor Khasanah

19312252

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 5 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



(Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Jumlah Anggota DPRD, Jumlah Anggaran Belanja Daerah, Bimbingan Teknis, Pendidikan Kepala Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

Disusun oleh : VIANA DEWI NOOR KHASANAH

Nomor Mahasiswa : 19312252

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 05 September 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFra., CertIPSAS.



MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari segala sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah, 94:6-7)

Tidak ada yang terlalu cepat maupun terlalu lambat. Semua berjalan sesuai dengan ketentuan waktu takdir dari Allah SWT yang tepat. Mungkin proses ini memang tidak cepat, tetapi rencana Allah SWT pasti tepat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Anggota DPRD, Jumlah Anggaran Belanja Daerah, Bimbingan Teknis, Pendidikan Kepala Daerah dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”**. Penyusunan skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka mencapai kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata-1 pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang di nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari penulis, yang tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak berikut atas dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad saw beserta sahabat yang memberikan tauladan yang baik dan menjadi rahmatan lil 'alamin bagi umat manusia.
3. Kepada orang tua penulis yaitu Bapak Sriyanto dan Ibu Khotimah yang penulis hormati dan cintai, terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFA. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing penulis.

5. Kakak penulis Friska, Deda, adik penulis Gavin Findiarsha dan keluarga besar penulis yang memberikan dukungan serta mendoakan penulis.
6. Salsabila, Fika, Tika, dan Hana selaku teman dari penulis sejak awal kuliah di Universitas Islam Indonesia dan selalu memberikan dukungan serta mengerjakan skripsi bersama.
7. Teman-teman KKN Unit 85 tahun 2022 yaitu Chelsie, Naila, Hanifah, Meiyani, Abinaya, Dimas, Benny dan Rafiq yang saling memberikan dukungan dan tips dalam menyusun skripsi.
8. Teman-teman dalam grup bimbingan Bapak Johan yang saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman penulis baik dari SMP, SMA, dan kuliah yang saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan menjadi penyemangat bagi penulis

Penulis berharap dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta,

Penulis, 5 Agustus 2023



Viana Dewi Noor Khasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Institusional	10
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan.....	12
2.1.3 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	13

2.1.4	Jumlah Anggaran Belanja Daerah	14
2.1.5	Bimbingan Teknis.....	14
2.1.6	Pendidikan Kepala Daerah.....	15
2.1.7	Umur Pemerintahan Daerah.....	16
2.1.8	Luas Daerah	16
2.1.9	Pemerintah Daerah.....	17
2.2	Penelitian Terdahulu.....	17
2.3	Kerangka Penelitian	21
2.4	Hipotesis Penelitian	22
2.4.1	Jumlah anggota DPRD dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	22
2.4.2	Jumlah anggaran belanja daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	23
2.4.3	Bimbingan teknis dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	24
2.4.4	Pendidikan kepala daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	24
2.4.5	Umur pemerintah daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	25
BAB III		27
METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Metodologi Penelitian	27
3.2	Populasi Dan Sampel.....	27
3.3	Variabel Penelitian	29
3.3.1	Variabel Independen (X)	29
3.3.2	Variabel Dependen (Y).....	32
3.3.3	Variabel Kontrol	32

3.4	Metode Analisis Data	33
3.4.1	Statistik Deskriptif	34
3.4.2	Metode Analisis Regresi Logistik.....	34
3.4.3	Uji Hipotesis	37
BAB IV		38
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	38
4.2	Metode Analisis Regresi Logistik	42
4.2.1	Menguji Keseluruhan Model (Overall Model Fit).....	42
4.2.2	Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness Fit Test)	43
4.2.3	Koefisien Determinasi	43
4.2.4	Analisis Regresi Logistik.....	44
4.3	Pengujian Hipotesis	46
4.3.1	Uji Parsial t	46
4.4	Pembahasan Uji Hipotesis.....	48
4.4.1	Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	48
4.4.2	Pengaruh jumlah anggaran belanja daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	50
4.4.3	Pengaruh bimbingan teknis terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	51
4.4.4	Pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	52
4.4.5	Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	54
BAB V.....		56
PENUTUP.....		56

5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Keterbatasan Penelitian	57
5.3	Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	60
	LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Bimbingan Teknis	31
Tabel 3. 2 Skala Pengukuran Variabel Pendidikan Kepala Daerah	31
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif	38
Tabel 4. 2 Iteration History	42
Tabel 4. 3 Hosmer and Lemeshow Test.....	43
Tabel 4. 4 Model Summary.....	43
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Regresi Logistik	44
Tabel 4. 6 Variable in the Equation	46
Tabel 4. 7 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	21
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kabupaten/Kota.....	64
Lampiran 2 Jumlah Anggota DPRD	68
Lampiran 3 Jumlah Anggaran Belanja Daerah	72
Lampiran 4 Bimbingan Teknis.....	77
Lampiran 5 Pendidikan Kepala Daerah	82
Lampiran 6 Umur Pemerintah Daerah	86
Lampiran 7 Luas Daerah.....	90
Lampiran 8 Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK).....	94
Lampiran 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif	98
Lampiran 10 Hasil Metode Analisis Regresi Logistik.....	99
Lampiran 11 Hasil Uji Hipotesis	101

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis, pendidikan kepala daerah, dan umur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun anggaran 2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan sampel sebanyak 120 pemerintahan daerah dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan teknis berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja daerah, Pendidikan kepala daerah dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis, Pendidikan kepala daerah, umur pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of the number of DPRD members, amount of regional budget, technical guidance, education of regional heads, and age of local government on the quality of financial reports of district/city local governments in Indonesia in the 2021 fiscal year. This research uses a quantitative method, with a sample of 120 regional governments using the method purposive sampling. This study used the logistic regression analysis method using SPSS program. Based on the results of the study, it shows that the technical guidance has a positive effect on the quality of local government financial reports. However, the number of DPRD members, the amount of the regional budget, the education of the regional head and the age of the regional government have no effect on the quality of the regional government's financial reports.

Keywords: *number of DPRD members, amount of regional budget, technical guidance, education of regional heads, age of local government, quality of local government financial reports.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, Indonesia mengalami kemajuan yang cukup baik untuk kualitas laporan perekonomian daerah di Indonesia. Hal ini tercermin dari meningkatnya komitmen dari pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat yang lebih modern dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan, pengelolaan hingga pembukuan dan pelaporan yang telah mengalami perubahan yang cukup besar dari peraturan sebelumnya (Yuliani & Agustini, 2016). Tetapi, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah agar terjaga dengan baik. Kualitas data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah masih kurang baik. Beberapa daerah terus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan dan mengelola data keuangan dengan benar, yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan mereka. Selain itu, masih terdapat beberapa orang dalam pengelolaan keuangan yang kurang berkualitas atau profesional dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan untuk mengelola keuangan negara dalam batas kewenangan negara. Kewenangan pengelolaan keuangan diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai administrator pajak dan agen negara yang menguasai kekayaan negara perseorangan. Presiden juga memberikan kewenangan kepada menteri/pimpinan lembaga untuk menjadi pengguna barang dalam negeri. Tak terkecuali bagi gubernur/bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengelola perekonomian daerah dan

mewakili pemerintahan daerah yang memegang kekayaan daerah yang terpisahkan. Sehubungan dengan tugas negara untuk mencapai tujuan negara, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun. APBD adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah dan terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan keuangan. APBD dibuat sesuai dengan kebutuhan pemerintah provinsi dan kemampuan pendapatan daerah.

Siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan dan pelaksanaan sampai dengan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Meskipun merupakan akhir dari siklus APBD, sebenarnya akuntabilitas merupakan fase yang krusial karena merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan ekonomi daerah. Selambat-lambatnya lima bulan setelah tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah harus menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan daerah berupa laporan keuangan yang telah disiapkan. Yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kerangka Acuan Konseptual Akuntansi Pemerintah Peraturan Dewan Negara No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bahwa laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi penting tentang kondisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor selama suatu periode pelaporan. Selain itu, laporan keuangan terutama digunakan untuk menentukan nilai dana yang digunakan dalam operasi pemerintah,

untuk menilai kondisi ekonomi, untuk menilai efisiensi dan efektivitas entitas pelapor dan untuk menentukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Ritonga (2014) menyatakan bahwa kondisi keuangan adalah kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban ekonominya (kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional, dan kewajiban menyediakan layanan publik), mengantisipasi kejadian yang tidak terduga, dan melaksanakan hak ekonomi secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah telah memperkenalkan standar akuntansi derivatif sejak tahun 2015. Tujuan diperkenalkannya standar tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah kota dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sehubungan dengan situasi keuangan pemerintah kota. Implikasi dari penyajian informasi keuangan daerah yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan mengakibatkan buruknya kualitas laporan keuangan (Firmansyah et al., 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keputusan tersebut menetapkan bahwa perekonomian daerah harus dikelola secara efektif, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas penyajian laporan keuangan terkait dengan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah tidak hanya terkait dengan penyajian angka, tetapi juga terkait dengan pengelolaan keuangan internal pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tanggung jawab administrasi organisasi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Kualitas laporan keuangan sangat mempengaruhi akuntabilitas dan laporan keuangan yang berkualitas tinggi merupakan kewajiban pertanggungjawaban

atau pelaporan keuangan untuk akuntabilitas (Setyowati et al., 2016). Kualitas laporan keuangan daerah sangat penting untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan tata kelola keuangan yang berbasis evidensi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut dan bertanggung jawab atas keakuratan dan kebenaran laporan keuangannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, memberikan dampak kepada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjalankan fungsinya sebagai pihak yang menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga harus memperhatikan good governance (Amalia, 2012). Selain sebagai penampung aspirasi masyarakat, DPRD juga memiliki peran dalam pemerintahan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik (Yuliani, 2021).

Belanja daerah merupakan pengeluaran atau penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pembangunan di daerah. Belanja daerah mencakup berbagai program dan kegiatan mulai dari pelayanan Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pembangunan ekonomi daerah. Belanja daerah harus selalu diarahkan pada tujuan pembangunan dan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar menciptakan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran belanja daerah merupakan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Anggaran belanja

daerah selalu tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang merupakan dokumen penting dalam penetapan prioritas pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus mengelola anggaran belanja daerah dengan baik dan efisien agar dapat mencapai tujuan pembangunan dengan memakai sumber daya secara efisien dan tepat sasaran. Salah satu cara untuk mengelola anggaran belanja daerah adalah melalui program akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mengandung prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi public, akuntabilitas dan anti korupsi. Program ini juga menggalakkan transparansi daerah sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran daerah secara terbuka dan bertanggung jawab.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah bagian wajib menyampaikan laporan tanggung jawab keuangan daerah. Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menilai kebenaran, keakuratan, kredibilitas dan kehandalan informasi dengan melakukan audit yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan hasil audit laporan keuangan pemerintah, yang mencakup pernyataan kebenaran informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah. Dari berbagai opini yang dapat dikeluarkan BPK RI, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang dicita-citakan oleh seluruh pemerintah daerah. Karena mendapat opini WTP merupakan prestasi dan kebanggaan pemerintah daerah. Opini WTP hanya diberikan untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Fatimah, et al 2014). Oleh karena itu dibutuhkannya sumber daya manusia atau aparatur yang berkualitas yang memiliki pemahaman mengenai penyusunan serta pengelolaan laporan keuangan pemerintah.

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari pegawai di pemerintahan daerah adalah dengan

melakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis (pelatihan) merupakan bantuan atau dukungan teknis yang diberikan pemerintah pada aparat pemerintah daerah dengan tujuan agar aparat tersebut lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan teknis/spesifik. Bimbingan teknis sering kali diberikan oleh instansi pemerintah pusat yang diakui ahlinya dalam bidang tertentu. Bimbingan teknis biasanya berisi informasi atau panduan teknis yang terkait dengan kebijakan teknis atau prosedur tertentu. Setiap bimbingan teknis harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pemerintah daerah, dimana bimbingan teknis dilakukan dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pemerintah daerah. Tujuannya agar bimbingan teknis menjadi mendukung dan bermanfaat bagi pekerjaan sehari-hari pemerintah daerah.

Dalam pemerintahan daerah, tingkat pendidikan kepala daerah merupakan faktor penting bagi kualitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendidikan yang diterima oleh seorang pemimpin dapat mempengaruhi kemampuan dan kapasitas mereka untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi dan mengelola sumber daya lokal secara efektif. Alasan seorang pemimpin daerah bahwa pendidikan sangat penting dalam pemerintahan dan pembangunan daerah disebabkan karena pemahaman baik terhadap isu-isu strategis. Dimana dengan pemahaman yang baik, seorang kepala daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan keahlian dalam mengelola keuangan. Memiliki pendidikan yang baik saja tidak menjamin kualitas laporan keuangan tetapi salah satu faktor yang dapat berkontribusi dalam mencapai kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Umur pemerintah daerah dapat diartikan sebagai tahun terbentuknya pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang berdiri daerah tersebut (Syafitri, 2012 dalam (Waliyyani & Mahmud,

2015)). Artinya, pembentukan pemerintahan daerah secara sah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga variabel umur pemerintah dapat diukur berdasarkan undang-undang yang membentuk kotamadya tersebut. Daerah dengan tahun pengelolaan yang lebih panjang memiliki lebih banyak pengalaman dan tentunya juga memiliki keterampilan yang sangat baik untuk membuat laporan keuangan secara adil sesuai SAP (Walliyani dan Mahmud : 2015, dalam (Naopal et al., 2017)).

Dalam penelitian ini, penulis akan menguji variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Penulis mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota DPRD dan jumlah anggaran belanja yang digunakan sebagai penguji teori isomorfisma koersif. Variabel bimbingan teknis yang digunakan sebagai penguji pada teori isomorfisma mimetik. Variabel pendidikan kepala daerah dan umur pemerintah daerah yang digunakan sebagai penguji pada teori isomorfisma normatif. Dan luas daerah sebagai variabel kontrol.

Uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Jumlah Anggota DPRD, Jumlah Anggaran Belanja Daerah, Bimbingan Teknis, Pendidikan Kepala Daerah dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan pada pernyataan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah jumlah anggota DPRD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah?

- b. Apakah jumlah anggaran belanja daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah?
- c. Apakah bimbingan teknik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah?
- d. Apakah pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah?
- e. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris seberapa besar pengaruh dari variabel jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis yang dilaksanakan pemerintah daerah, pendidikan kepala daerah dan umur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pemerintah

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pemerintah daerah mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Selain itu, diharapkan agar pemerintah dapat memperbaiki faktor faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

2. Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian mengenai kualitas laporan keuangan.

3. Penulis

Dari dilakukannya penelitian ini, diharapkan penulis mendapatkan tambahan wawasan yang semakin luas, membantu penulis dalam memahami bidang ini, serta meningkatkan kemampuan analisis penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan. Hal ini agar penelitian terfokus pembahasan pada topik dan tidak meluas kepermasalahan lain. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini, pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, pembahasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesis penelitian.

Bab III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, pembahasan mengenai jenis dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta metode analisis data.

Bab IV ANALISIS DATA

Pada bab ini, pembahasan mengenai analisis data, pengujian dan penjelasan mengenai hipotesis yang telah dibuat, serta pembahasan mengenai hasil yang dikaitkan dengan penelitian terdahulu.

Bab V KESIMPULAN

Pada bab ini, berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran untuk penelitian pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Institusional

Teori institusional (*institutional theory*) atau teori kelembagaan dasar pikirannya adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang akan menyebabkan terjadinya institusionalisasi (Nadila et al., 2021). Teori institusional yang dikemukakan oleh Scott (2008) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Menurut DiMaggio & Powell (1983), isomorphism adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Terdapat 3 (tiga) macam bentuk isomorphism, yakni (1) *Mimetic Isomorphism* adalah peniruan organisasi dengan respon ketidakpastian; (2) *Coercive Isomorphism* menunjukkan adalah organisasi mengambil beberapa cara untuk melakukan adopsi dikarenakan tekanan negara (pengaruh politik), organisasi yang memiliki kekuasaan lebih besar yang hal ini berdampak pada legitimasi; (3) *Normative Isomorphism*, berkaitan dengan norma yang berlaku.

Mekanisme isomorfisma koersif merujuk pada proses dimana organisasi mengadopsi fitur (sifat) tertentu karena paksaan (tekanan) dari negara, organisasi lain atau masyarakat (DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfisme koersif cenderung membentuk kepatuhan semu atau sekadar ritual karena motivasinya hanya untuk mengikuti aturan. Mekanisme isomorfisma mimetik terjadi karena adanya peniruan, yaitu terjadi pada saat organisasi mengalami ketidakpastian mengenai suatu operasi atau proses (DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfisma mimetik dapat

berfungsi sebagai solusi praktis bagi organisasi yang tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Mekanisme isomorfisma normatif berkaitan dengan batasan atau persyaratan yang timbul dari profesi. Tekanan normatif pada organisasi dapat berdampak signifikan, pengalaman individu dalam organisasi dapat memutuskan apakah organisasi dipandang sah atau tidak (Winarni & Zamakhasyari, 2021).

2.1.1.1 Tekanan Koersif

Isomorfisma koersif dihasilkan dari tekanan formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi oleh organisasi lain tempat mereka bergantung dan dari ekspektasi budaya dalam masyarakat tempat organisasi beroperasi. Tekanan tersebut dapat dirasakan sebagai suatu kekuatan, dorongan atau ajakan untuk melakukan aksi bersama (Meyer et al, (1981) dalam jurnal (DiMaggio & Powell, 1983). Menurut Basuki & Ridha (2012) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan indikator tekanan koersif eksternal terhadap pelaporan keuangan. Tekanan datang dari pengaruh politik dan masalah legitimasi. Misalnya, peraturan pemerintah dan pengakuan tekanan organisasi yang lebih tinggi. Berdasarkan perspektif teori institusional isomorfisma koersif, banyaknya jumlah anggota DPRD dan jumlah anggaran belanja daerah menyebabkan organisasi melakukan tekanan koersif yang digunakan dalam memenuhi tekanan dari luar organisasi untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.1.2 Tekanan Mimetik

Menurut DiMaggio & Powell (1983) Isomorfisma mimetik adalah tekanan yang terjadi ketika suatu organisasi meniru praktik yang ada dari organisasi lain yang dianggap lebih baik dan lebih berhasil. Isomorfisma mimetik adalah hasil ketidakpastian yang mendorong organisasi untuk

mencontoh diri mereka secara sengaja atau tidak sengaja (melalui pengaruh konsultan dan karyawan yang disewa dari perusahaan lain) lebih banyak lagi rekan-rekan yang sah atau sukses (Roszkowska-Menkes & Aluchna, 2019). Berdasarkan perspektif teori institusional isomorfisma mimetik, bimbingan teknis aparat pemerintah melakukan tekanan mimetik untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.1.3 Tekanan Normatif

Tekanan normatif seringkali berjalan seiring dengan meningkatnya profesionalisme di bidang tertentu. Norma atau sesuatu yang sesuai bagi suatu organisasi, muncul melalui pendidikan formal dan sosialisasi pengetahuan formal tersebut dalam bidang tertentu yang mendukung dan menyebarkan keyakinan normatif tersebut. Dengan meningkatnya profesionalisme, tekanan normatif juga meningkat (Roszkowska-Menkes & Aluchna, 2019). Berdasarkan perspektif teori institusional isomorfisma normatif, pendidikan kepala daerah dan umur pemerintah daerah sebagai bentuk tekanan normatif untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan PP NO. 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi entitas pelapor selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah, mengevaluasi kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi entitas pelapor, dan membantu menentukan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Menurut PSAK No.1 (2019:1) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain pengertian

dari PSAK, menurut Munawir (2014:2) mengatakan bahwa laporan keuangan menurut dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan dapat dikatakan memiliki hasil apabila laporan keuangan dapat menunjukkan suatu kondisi keuangan pada perusahaan (Mutiah et al., 2020).

Kualitas laporan keuangan daerah terkait erat dengan penyusunan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan daerah. Setelah akuntansi negara berbasis perhitungan diberlakukan pada tahun 2015, perkembangan pada tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa tidak semua kota menerima pernyataan tanpa komentar (BPK RI, 2021 dalam (Firmansyah et al., 2022).

2.1.3 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD terdiri dari tiga wilayah administratif yaitu di provinsi, kabupaten dan kota. Anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPRD, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan minimal 20 kursi dan maksimal 55 kursi.

Peningkatan pengawasan pemerintah daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel dan efisien. Dengan pengawasan tersebut anggota DPRD dapat

memastikan bahwa masyarakat telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, pengawasan juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang merugikan masyarakat. Untuk meningkatkan pengawasan, anggota DPRD harus mampu memahami peraturan dan undang-undang yang berlaku agar dapat efektif mengawasi kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, harus ada koordinasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah di semua bidang politik dan pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga.

2.1.4 Jumlah Anggaran Belanja Daerah

Menurut UU No 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan, Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

2.1.5 Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis merupakan suatu kegiatan dimana diadakan pelatihan bagi pesertanya, yang memiliki manfaat dalam memperluas pengetahuan peserta. Bimbingan teknis diadakan karena untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah. Materi dari bimbingan teknis ini meliputi membangun kelompok kinerja yang efektif, teknik komunikasi terkait pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat dan cara menangani keluhan masyarakat, meningkatkan profesionalisme serta tata pemerintahan yang baik.

Bimbingan teknis sangat penting bagi aparat pemerintah daerah karena membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah. Bimbingan teknis juga dapat membantu aparat pemerintah daerah memahami peraturan, standar, prosedur pemerintah. Hal ini memudahkan aparat untuk melakukan tata kelola yang baik dan tugas administratif dengan baik. Selain itu, bimbingan teknis dapat memperkuat keterampilan dalam mengelola keuangan daerah, memantau program dan kebijakan publik, serta mengevaluasi dampak sosialnya. Bimbingan teknis yang efektif dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi untuk terus belajar dan berkembang.

2.1.6 Pendidikan Kepala Daerah

Pendidikan secara umum merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya sebagai upaya pemberian informasi, pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meluaskan usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan keterampilan individu untuk mencapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, tetapi juga dalam kehidupan untuk perkembangan menuju dewasa (Rahman et al., 2022).

Jenjang pendidikan kepala daerah sangat penting karena kepala daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kepemimpinan dan pengelolaan daerah. Seorang kepala daerah yang berpendidikan tinggi lebih mampu menerapkan langkah-langkah yang baik dan efektif untuk memajukan daerahnya sendiri. Selain itu, memiliki pendidikan yang tinggi juga dapat membantu pengelola daerah memahami permasalahan di

daerahnya dan menemukan solusi yang tepat. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan kepala daerah sangat penting bagi keberhasilan pemerintahan daerah.

2.1.7 Umur Pemerintahan Daerah

Umur pemerintahan daerah merupakan tahun terbentuknya pemerintah daerah berdasarkan dengan undang-undang pada daerah tersebut (Setyaningrum, D., & Sayfitri, F.(2014) dalam (Rofiq & Arza, 2021). Pembentukan daerah kabupaten/kota di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pembentukan atau penggabungan daerah didasarkan pada kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya, dan komunikasi yang efektif antar daerah. Dengan demikian, umur daerah kabupaten/kota bervariasi tergantung pada waktu pembentukannya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 4, menyatakan bahwa umur daerah adalah tahun terbentuknya pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah pemekaran suatu daerah yang menjadi dua daerah atau lebih.

2.1.8 Luas Daerah

Daerah didefinisikan sebagai batas geografis yang jelas, seperti batas administratif atau budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah atau daerah merupakan variabel yang mencerminkan perlunya penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kesatuan wilayah. Artinya, semakin besar wilayah administrasi, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang efisien. Dalam hal dengan pemekaran wilayah, besar kecilnya wilayah kemungkinan besar terkait erat dengan penganggaran belanja modal.

2.1.9 Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	(Yuliani & Agustini, 2016)	Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian intern, kualitas laporan keuangan.	Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

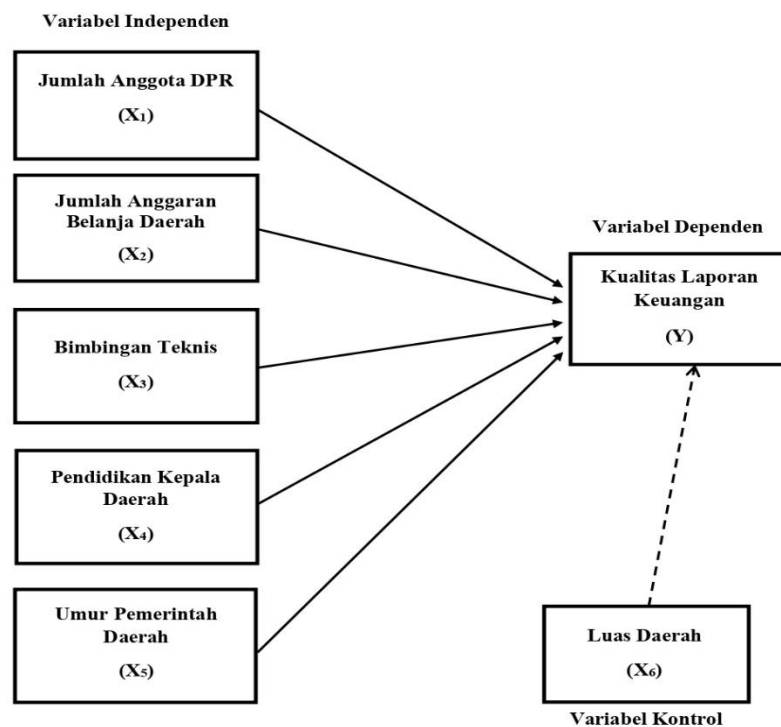
2	(Andriyan, Bustami, & Muallim, 2021)	Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkatan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci	Size, Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemandirian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil dari penelitian tersebut menggunakan linier berganda sehingga dapat diketahui bahwa variabel size, Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemandirian dan Dewan Perwakilan Rakyat mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis menggunakan koefisien determinasi mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan LKPD dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti dan dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari pembahasan pada penelitian tersebut. Sedangkan hasil dari uji hipotesis mengungkapkan bahwa size dan DPRD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan SKPD dan kemandirian memiliki pengaruh yang negatif
---	--------------------------------------	--	---	--

				terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
3	(Kogoya et al., 2020)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD di pemerintah kabupaten-kota di provinsi Papua	Ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, hasil temuan audit, jumlah SKPD/OPD, tingkat ketergantungan fiskal, pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dan pada ukuran pemerintah daerah, jumlah OPD, tingkat ketergantungan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan sedangkan untuk hasil temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
4	(Aziz, 2016)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Ukuran pemerintah daerah, <i>intergovernmental revenue</i> , belanja daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah	Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa karakteristik pemerintah daerah seperti ukuran pemerintah daerah, <i>intergovernmental revenue</i> , dan belanja daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5	(Fatimah et al., 2014)	Pengaruh sistem pengendalian intern,	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa SPAP dan kepatuhan perundang-

		kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia	(SPAP), Kepatuhan terhadap perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya, umur pemerintah daerah, penerimaan opini WTP pada LKPD	undangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini WTP pada LKPD. Untuk variabel umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP pada LKPD. Sedangkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini WTP.
6	(Taufiqurrohman & Puspita, 2020)	Pengaruh Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah dan bimbingan teknis keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, bimbingan teknis, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK RI)	Hasil dari penelitian tersebut yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan bimbingan teknis keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

7	(Wungow et al., 2016)	Pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan dan jabatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, jabatan dan kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan dan masa kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan untuk variabel pelatihan dan jabatan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
---	-----------------------	---	--	--

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang

sesuai dengan latar belakang, tujuan penelitian dan kajian pustaka yang dijelaskan diatas, maka akan dikembangkan kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual merupakan suatu gambaran atau deskripsi teoritis yang menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Kerangka konseptual membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis dan mencari data untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Kerangka konseptual terdiri dari tiga elemen yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol. Pada gambar diatas, menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja, bimbingan teknis, pendidikan kepala daerah, dan umur pemerintah daerah. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta luas daerah sebagai variabel kontrol.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis sementara dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

2.4.1 Jumlah anggota DPRD dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Salah satu badan legislatif pemerintah Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena tidak ada badan legislatif daerah dalam negara kesatuan. Oleh karena itu, DPRD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah, namun kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang merupakan pemimpin daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan" (Santoso, 2011). Setiap kabupaten/kota pasti memiliki jumlah yang berbeda untuk badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam

perspektif teori institusional, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapatkan tekanan normatif yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan penelitian sebelumnya (Andriyan et al., 2021) dimana dapat mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah. Serta sesuai dengan penelitian (Kusuma et al., 2021) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *legislatif size* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1 : Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Jumlah anggaran belanja daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Anggaran merupakan rencana keuangan untuk masa yang akan datang yang biasanya diperpanjang selama satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam perspektif teori institusional, anggaran belanja daerah mendapatkan tekanan normatif. Sesuai dengan penelitian sebelumnya (Aziz, 2016) dimana pada penelitian tersebut belanja daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Penelitian lainnya yaitu penelitian (Priyastiwati & Saputra, 2019) yang menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2 : Jumlah anggaran belanja daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Bimbingan teknis dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam instansi, karena kemajuan dan keberhasilan instansi tidak lepas dari peran dan kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengerahkan seluruh potensinya apabila tersedia sumber daya manusia yang berkualitas. Bimbingan teknis merupakan pelatihan yang dapat memperkuat keterampilan aparatur dalam mengelola anggaran daerah, memantau program dan kebijakan publik dan melakukan evaluasi dampaknya pada masyarakat. Sebuah bimbingan teknis yang efektif dapat memberikan pengetahuan baru dan memberikan dampak yang baik terhadap aparat untuk terus belajar agar dapat menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam perspektif teori institusional, bimbingan teknis mendapatkan tekanan mimetik. Sesuai penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Taufiqurrohman & Puspita, 2020) menunjukkan bahwa bimbingan teknis berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya yaitu penelitian (Hartati, 2016) menunjukkan bahwa pelatihan teknis atau bimbingan teknis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3 : Bimbingan teknis berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.4 Pendidikan kepala daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembelajaran, baik secara teknis maupun administratif, melalui proses dan prosedur

yang sistematis dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Dengan menempuh tingkat Pendidikan menyebabkan seseorang memiliki pengetahuan tertentu. Tingkat Pendidikan merupakan hal penting dalam pemerintahan daerah karena menentukan kemampuan kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Dengan adanya Pendidikan yang memadai, akan memperkuat kepala daerah dapat mengelola sumber daya yang ada, berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik.

Dalam perspektif teori institusional, Pendidikan kepala daerah mendapatkan tekanan normatif. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Sukriani et al., 2018) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan BUMDes. Penelitian lainnya yaitu penelitian (Irnanta, 2020) yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan yang positif terhadap kualitas akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4 : Pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.5 Umur pemerintah daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Umur pemerintah daerah mengacu pada rentang waktu atau durasi sejauh mana pemerintah daerah telah beroperasi atau berfungsi dalam sistem pemerintahan suatu negara. Selain itu, umur pemerintahan dapat merujuk pada stabilitas politik atau administratif pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang telah beroperasi selama lebih dari beberapa dekade dengan stabil dan tanpa adanya perubahan yang signifikan dapat dikatakan memiliki umur yang lama dan stabil. Dengan umur yang lama dan stabil itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat lebih berkualitas karena adanya pengalaman, pengetahuan serta

kemampuan aparatur daerah. Dalam perspektif teori institusional, umur pemerintah daerah termasuk dalam tekanan normatif.

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Kogoya (2019) yang menunjukkan hasil bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian (Setyaningrum & Syafitri, 2014) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa umur administratif Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan yaitu semakin tua umur administratif Pemerintah Daerah mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan LKPD secara lengkap. Pada penelitian ini umur pemerintah daerah diukur dengan perhitungan dari tahun terbentuk hingga pada tahun anggaran 2021. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H5 : Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang berasal dari situs web organisasi pemerintah yang dapat diakses secara umum. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan pemerintah daerah, website resmi pemerintah daerah, serta situs web Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2018:130) didefinisikan sebagai wilayah umum yang terdiri dari objek/subjek dengan karakteristik dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, yang diteliti dan dari situ ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 38 provinsi yang terdapat di Indonesia, terdapat 514 kabupaten/kota sehingga dapat diartikan bahwa di Indonesia terdapat 514 laporan keuangan pemerintah daerah.

Sampel menurut Sugiyono (2017) merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian, dimana populasi adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Pada penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dalam aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diperiksa (Sugiyono, 2018). Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan rumus Slovin. Menurut Sugiyono (2017) rumus slovin adalah suatu rumus yang digunakan untuk mencari besaran sampel yang dinilai

mampu mewakili keseluruhan populasi. Rumus slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui, yaitu sebanyak 514 kabupaten/kota. Ditetapkan 10% untuk tingkat akurasi yang ditentukan dalam definisi sampel. Alasan dari penulis menggunakan tingkat akurasi 10% dikarenakan jumlah populasi pada penelitian ini kurang dari 1000.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = pertimbangan ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi, kemudian dikuadratkan (10%)

Berdasarkan dari rumus Slovin, maka dapat dituliskan besar penarikan jumlah sampel pada penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\n &= \frac{514}{1 + 514(0,1)^2} \\&= 83,71 \text{ (dibulatkan jadi 84)}\end{aligned}$$

Populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun anggaran 2021 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi yang mudah diakses sebagai berikut:

1. *Website* resmi Badan Pusat Statistik menyediakan data mengenai daftar kabupaten/kota di Indonesia. <https://www.bps.go.id>

2. *Website* resmi Badan Pemeriksaan Keuangan setiap daerah yang menyediakan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2021
3. *Website* resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setiap daerah yang menyediakan data mengenai pelaksanaan bimbingan teknis pemerintah daerah
4. *Website* resmi Kabupaten/Kota yang menyediakan data:
 - a. Menyediakan data jumlah anggota DPRD setiap daerah
 - b. Menyediakan laporan keuangan untuk pengambilan data jumlah anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2021
 - c. Menyediakan latar belakang atau profil Kepala Daerah pada tahun 2021
 - d. Menyediakan data mengenai tanggal berdiri atau terbentuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang
 - e. Menyediakan data luas daerah

3.3 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, variabel dependen yang diteliti yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, variabel independen yaitu jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis, Pendidikan kepala daerah, dan umur pemerintah daerah. Untuk variabel kontrol yaitu luas daerah.

3.3.1 Variabel Independen (X)

Variabel Independen merupakan faktor yang memengaruhi atau mempengaruhi variabel lain yang dapat diamati atau dipelajari. Menurut beberapa ahli, variabel independen atau bebas dapat didefinisikan sebagai variabel yang dapat dimanipulasi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau variabel yang ingin diamati atau dipelajari. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independen adalah jumlah anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jumlah anggaran belanja, bimbingan teknis, pendidikan kepala daerah, serta umur pemerintah daerah.

a. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan minimal 20 kursi dan maksimal 55 kursi.

b. Jumlah anggaran belanja daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat 32-33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 1 ayat 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

$$\text{Jumlah Anggaran Belanja} = \text{Ln (Anggaran Belanja Daerah)}$$

c. Bimbingan teknis

Bimbingan teknis merupakan salah satu cara yang cukup penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan pemerintah daerah.

Bimbingan teknis dalam jangka panjang yang efektif dapat membantu aparat pemerintah daerah dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang akan berguna bagi pemerintahan di masa depan. Pengukuran variabel bimbingan teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis	Skala
Ya	1
Tidak	0

d. Pendidikan kepala daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan dasar masyarakat yang wajib. Pada umumnya kepala daerah memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena dengan adanya pendidikan yang memadai akan memperkuat kemampuan kepala daerah untuk mengelola sumber daya yang ada, memperoleh dana dan dukungan untuk pembangunan, berkomunikasi dengan masyarakat serta memahami undang-undang dan kebijakan yang berlaku.

Tabel 3. 2 Skala Pengukuran Variabel Pendidikan Kepala Daerah

Pendidikan terakhir	Skala
Sekolah Menengah Atas	1
Strata I	2
Strata II	3
Strata III	4

e. Umur pemerintah daerah

Umur pemerintahan daerah tergantung pada tanggal terbentuknya otonomi daerah di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Umur pemerintahan daerah berbeda-beda

karena pembentukan dan perkembangan otonomi daerah Indonesia tidak terjadi di semua daerah secara bersamaan. Pembentukan otonomi daerah di setiap provinsi dan kabupaten berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, sosial, budaya dan politik daerah. Dalam penelitian ini perhitungan umur pemerintah dimulai dari tahun berdiri daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku hingga tahun anggaran 2021.

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau tergantung pada variabel independen atau variabel yang ingin diamati atau dipelajari. Dalam penelitian, variabel dependen sering didefinisikan sebagai variabel yang diukur atau diamati karena adanya pengaruh dari variabel independen. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

a. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi kejelasan dan transparansi informasi yang dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, konsistensi dan keandalan informasi dalam laporan keuangan dan kecukupan akuntansi dan pengelolaan laporan keuangan daerah. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, pengukuran variabel kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia jika pemerintah daerah mendapatkan opini WTP maka akan mendapatkan point 1, dan apabila pemerintah daerah mendapatkan opini non-WTP maka akan mendapatkan point 0.

3.3.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel dalam suatu penelitian yang dikendalikan dan diatur sedemikian rupa sehingga meminimalkan

atau menghilangkan pengaruh variabel lain dalam penelitian tersebut. Variabel kontrol dapat dipandang sebagai variabel yang dipertahankan konstan atau cukup stabil sehingga ketika melakukan pengamatan dari variabel independen ke variabel dependen, dapat diprediksi bahwa variabel kontrol tidak akan berpengaruh pada hasil. Beberapa ahli tidak menganggap variabel kontrol sebagai variabel yang diukur secara langsung dalam suatu penelitian, tetapi disusun sedemikian rupa sehingga variabel bebas dan terikat memiliki hubungan yang lebih jelas. Dalam penelitian ilmiah, variabel kontrol sering digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis atau untuk menjelaskan karakteristik variabel independen atau dependen. Dalam penelitian ini, variabel kontrol yang dimasukkan adalah umur pemerintah daerah.

a. Luas daerah

Luas daerah merujuk merujuk pada ukuran geografis atau batas wilayah suatu pemerintahan. Luas daerah diukur dalam satuan tertentu seperti kilometer persegi (km²). Semakin luas daerah maka akan semakin banyak wilayah yang harus diperhatikan dan membutuhkan pengawasan yang lebih dari pemerintah. Luasnya daerah dapat membuka peluang untuk lebih melibatkan dan meluaskan pengawasan keuangan oleh aparatur baik eksternal maupun internal. Dalam daerah yang luas, kebutuhan untuk memperkuat pengawasan agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan penggunaan sumber daya manusia yang baik semakin meningkat.

$$\text{Luas Daerah} = \text{Ln} (\text{Luas Daerah})$$

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses mengelola data untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat

keputusan atau menjawab pertanyaan yang muncul. Dalam metode analisis data ini, pengujian yang digunakan antara lain:

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran tentang karakteristik masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan nilai mean (rata-rata), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum dan jumlah data (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi gambaran mengenai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis, pendidikan kepala daerah, umur pemerintah daerah dan luas daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.4.2 Metode Analisis Regresi Logistik

Metode analisis regresi logistik merupakan salah satu teknik dalam statistika yang digunakan untuk memprediksi probabilitas atau peluang suatu peristiwa yang terjadi atau tidak terjadi, berdasarkan variabel independen dan variabel dependen. Metode analisis regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat pengujian yaitu menilai keseluruhan model (overall model fit), menguji kelayakan model regresi (goodness of fit test), koefisien determinasi, dan model regresi logistik.

3.4.2.1 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Overall model fit dalam penelitian digunakan untuk dapat mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Statistik yang digunakan dalam model pengujian ini yaitu berdasarkan fungsi *Likelihood*. *Likelihood* L dari model merupakan probabilitas bahwa yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2Log likelihood . Pengujian ini dilakukan dengan

membandingkan nilai $-2\text{Log likelihood block number} = 0$ dengan nilai $-2\text{Log likelihood block number} = 1$. Jika nilai -2Log likelihood awal ($\text{block number} = 0$) lebih besar dari nilai -2Log likelihood setelahnya ($\text{block number} = 1$), maka penurunan menunjukkan bahwa model regresi lebih baik. Hipotesis untuk menilai uji keseluruhan model ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_1 = Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

3.4.2.2 Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Goodness of fit test atau uji kelayakan model regresi dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's*. model ini menguji hipotesis nol apakah data empiris telah sesuai dengan model. Hipotesis tersebut sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi *Hosmer and Lemeshow's* $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya. Sehingga *goodness fit* model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.
- b. Jika nilai signifikansi *Hosmer and Lemeshow's* $\geq 0,05$ maka H_0 dapat diterima, yang artinya bahwa model telah sesuai dengan nilai observasinya. Sehingga *goodness fit* model dapat memprediksi nilai observasinya

3.4.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilihat dari nilai *Nagelkere R Square*. *Nagelkerke R Square* merupakan modifikasi antara koefisien *cox and snell* untuk memastikan bahwa nilai akan bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Dimana nilai

Nagelkerke R Square yang memiliki nilai kecil atau mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan jika nilai *Nagelkerke R Square* memiliki nilai mendekati satu, menunjukkan bahwa variabel independen mampu dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan variabel dependen.

3.4.2.4 Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independent (input) dengan variabel dependen (output) yang bersifat dikotomik (biasanya 0 dan 1). Persamaan analisis regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y = Opini BPK (WTP = 1 dan non-WTP = 0)

a = Konstanta

β_1 = Koefisien Jumlah Anggota DPRD

X_1 = Jumlah Anggota DPRD

β_2 = Koefisien Jumlah Anggaran Belanja Daerah

X_2 = Jumlah Anggaran Belanja Daerah

β_3 = Koefisien Bimbingan Teknis

X_3 = Bimbingan Teknis

β_4 = Koefisien Pendidikan Kepala Daerah

X_4 = Pendidikan Kepala Daerah

β_5 = Koefisien Umur Pemerintah Daerah

X_5 = Variabel Umur Pemerintah Daerah

β_6 = Koefisien Luas Daerah

X_6 = Variabel Luas Daerah

e = Residual error

3.4.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis berdasarkan data yang ada. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk membuat keputusan atau kesimpulan tentang apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak didukung.

3.4.3.1 Uji Parsial t

Uji parsial t digunakan dalam analisis regresi logistik untuk menilai pengaruh secara masing-masing (parsial) dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi setiap variabel. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 tidak didukung dan H_1 diterima, yang artinya bahwa variabel independen signifikan atau berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 tidak didukung, yang artinya bahwa variabel independen tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis, pendidikan kepala daerah, umur pemerintah daerah, dan luas daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 120 data kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini akan dijadikan informasi untuk menjawab pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pengujian data penelitian ini dengan menggunakan SPSS 16.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis, Pendidikan kepala daerah, dan umur pemerintah daerah sebagai variabel independen, luas daerah sebagai variabel kontrol, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Jumlah anggota DPRD	120	20	50	34,17	9,838
Ln(Jumlah anggaran belanja daerah)	120	24,46	29,44	27,8492	,70588
Bimbingan teknis	120	0	1	,65	,479
Pendidikan kepala daerah	120	1	4	2,54	,839
Umur Pemda	120	8	78	41,63	23,211
Ln(Luas daerah)	120	3,41	12,48	7,6061	1,47465
Kualitas LK Pemda	120	0	1	,80	,402

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16, 2023

Hasil analisis statistik deskriptif adalah sebagaimana diringkas pada Tabel 4.1 tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diukur menggunakan logaritma natural (\ln) dari jumlah anggota DPRD yang berada di daerah kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa jumlah anggota DPRD memiliki nilai minimal sebesar 20 kursi dan nilai maksimal sebesar 50 kursi dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 34,17 dan standar deviasi sebesar 9,838. Daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD dengan nilai minimum atau sebesar 20 kursi yaitu kabupaten/kota Kepulauan Mentawai, Natuna, Waropen, Malinau, Tomohon, Konawe Kepulauan, Pulau Taliabu, Buru Selatan, Pulau Morotai, Kaimana, dan Teluk Wondama. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD dengan nilai maximum atau sebesar 50 kursi yaitu kabupaten/kota Langkat, Bekasi, Simalungun, Batam, Tasikmalaya, Ciamis, Tegal, Sleman, Jember, Jombang, Lebak, Tangerang Selatan, Lombok Tengah, Sukabumi, Banyuwangi, dan Karawang.
2. Variabel jumlah anggaran belanja daerah berdasarkan pada Tabel 4.1 menunjukkan jumlah anggaran belanja daerah minimum sebesar 24,46 dan jumlah anggaran belanja daerah maximum sebesar 29,44. Dengan rata-rata (mean) sebesar 27,8492 dan standar deviasi sebesar 0,70588. Daerah dengan jumlah anggaran belanja daerah minimum adalah Kabupaten Bengkalis yaitu dengan jumlah anggaran belanja daerah sebesar Rp.41.888.798.510, serta daerah yang memiliki jumlah anggaran belanja daerah dengan nilai maximum yaitu Kota Bekasi dengan jumlah anggaran belanja daerah sebesar Rp.6.113.945.828.498.

3. Variabel bimbingan teknis diukur dengan menggunakan skala yang dikelompokkan menjadi 2 angka. Angka 0 memiliki arti bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut tidak melaksanakan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah terhadap aparat dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan angka 1 memiliki arti bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut melaksanakan bimbingan teknis terhadap aparat pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0 dan nilai maximum sebesar 1. Dengan rata-rata (mean) sebesar 0,65 dan standar deviasi sebesar 0,479.
4. Variabel pendidikan kepala daerah diukur menggunakan skala yang dikelompokkan menjadi 4 angka. Pengukuran tersebut berdasarkan jenjang pendidikan terakhir kepala daerah, dimana Strata III = 4, Strata II = 3, Strata I = 2, dan SMA/MA = 1. Berdasarkan pada Tabel 4.1 tersebut nilai minimum sebesar 1 dan maximum sebesar 4, dengan rata-rata (mean) sebesar 2,54 dan standar deviasi sebesar 0,839. Daerah dengan nilai minimum yaitu daerah kabupaten/kota Karo, Pelalawan, Bantul, Jombang, Barito Utara, Polewali Mandar, Buru Selatan, Halmahera Selatan, Kaimana dan Halmahera Selatan. Sedangkan daerah dengan nilai maximum yaitu Kabupaten/Kota Kepahiang, Kerinci, Nias Selatan, Tasikmalaya, Lebak, Sumbawa Barat, Barito Selatan, Malinau, Gowa, Maros, Bone Bolango, Maluku Tengah, Jayapura dan Dairi.
5. Variabel independen umur pemerintah daerah berdasarkan uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum yaitu sebesar 8 serta nilai maximum sebesar 78, dengan rata-rata (mean) sebesar 41,63 dan standar deviasi sebesar 23,211. Daerah yang memiliki jumlah umur pemerintah daerah minimum yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan dan

Pulau Taliabu. Sedangkan daerah dengan jumlah umur pemerintah daerah maximum yaitu Kabupaten Musi Rawas.

6. Variabel kontrol luas daerah berdasarkan uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh yaitu sebesar 3,41 dan nilai maximum yang diperoleh yaitu sebesar 12,48, dengan *mean* (rata-rata) sebesar 7,6061 dan standar deviasi sebesar 1,47465. Daerah dengan luas daerah minimum yaitu kabupaten Banyuwangi dengan luas daerah sebesar 30,13km² dan daerah dengan luas daerah maximum yaitu Kabupaten Natuna dengan luas daerah sebesar 264.198km².
7. Variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2021. Yang selanjutnya diukur menggunakan skala 2 angka yaitu jika opini BPK tersebut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka memperoleh nilai 1, dan kebalikannya jika tidak mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (non-WTP) maka memperoleh nilai 0. Berdasarkan uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 nilai minimum yaitu 0 dan maksimum 1, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 0,80 dan standar deviasi sebesar 0,402. Terdapat 24 daerah yang mendapatkan nilai minimum atau memperoleh opini non-WTP yaitu kabupaten/kota Langkat, Bekasi, Simalungun, Nias Selatan, Musi Banyuasin, Tanjungbalai, Kepulauan Mentawai, Ngada, Jeneponto, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Jember, Mandailing Natal, Ambon, Waropen, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Banggai Kepulauan, Tana Toraja, Pulau Taliabu, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Labuhan Batu, dan Padang Lawas Utara.

4.2 Metode Analisis Regresi Logistik

4.2.1 Menguji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Kriteria pengujian pada *Overall Model Fit* yaitu jika nilai $-2\text{Log likelihood} < \text{Chi-square Tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi syarat uji. Sedangkan jika nilai $-2\text{Log likelihood} > \text{Chi-square Tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memenuhi syarat uji. Berikut ini adalah hasil pengujian *Overall Model Fit* sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Iteration History

<i>-2Log likelihood block</i> (number = 0)	120.097
<i>-2Log likelihood block</i> (number = 1)	105.481

Sumber: Hasil olah data SPSS 16, 2023

Berdasarkan pada Tabel 4.2 diatas, diperoleh nilai $-2\text{Log likelihood block (number = 0)}$ sebesar 120.097. Nilai tersebut lebih kecil dari *Chi-Square Tabel*, dimana nilai *Chi-square Tabel* didapatkan dengan perhitungan $Df = n-1$ (120-1), maka diperoleh hasil *Chi-square Tabel* sebesar 145.460740. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai $-2\text{Log likelihood block (number = 0)} < \text{Chi-square Tabel}$ atau $120.097 < 145.460740$ maka data tersebut sebelum variabel independen dimasukkan sudah memenuhi syarat uji. Setelah variabel independen dimasukkan, diperoleh nilai signifikansi $-2\text{Log likelihood block (number = 1)}$ sebesar 105,481. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai *Chi-square Tabel*, dimana nilai *Chi-square* didapatkan dengan perhitungan $Df = n - K - 1$ (120 - 6 - 1) sehingga diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 138,811363. Maka dapat diketahui bahwa nilai $-2\text{Log likelihood block (number = 1)} < \text{Chi-square Tabel}$ atau $105,481 < 138,811363$. Selain itu, nilai $-2\text{Log likelihood block (number = 1)}$ menunjukkan penurunan dari nilai $-2\text{Log likelihood block (number = 0)}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi

yang lebih baik atau dapat dikatakan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data.

4.2.2 Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness Fit Test)

Pengujian kelayakan model regresi menggunakan *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test*.

Tabel 4. 3 *Hosmer and Lemeshow Test*

Chi-square	df	Sig.
12.895	8	.116

Sumber: Hasil olah data SPSS 16, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,116. Dalam kriteria pengujian, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dikatakan baik. Sesuai dengan Tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari atau sama dengan 0,05 atau $0,116 \geq 0,05$ maka H_0 diterima atau model sesuai dengan nilai observasinya.

4.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi dalam data yang dijelaskan oleh model. Koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1, dan semakin tinggi nilainya, maka akan semakin baik model tersebut sesuai dengan data.

Tabel 4. 4 *Model Summary*

Step	-2Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	105.481 ^a	.115	.181

Sumber: Hasil olah data SPSS 16, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, diperoleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,181. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis, pendidikan kepala daerah, dan umur pemerintah daerah dalam menjelaskan

variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hanya sebesar 18,1%. Sedangkan 81,9% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar dari model dalam penelitian ini.

4.2.4 Analisis Regresi Logistik

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistik, dengan melihat pengaruh variabel jumlah anggota DPRD (X1), jumlah anggaran belanja (X2), bimbingan teknis (X3), pendidikan kepala daerah (X4), umur pemerintah daerah (X5), dan luas daerah (X6) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2021.

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Regresi Logistik

		β	S.E.	Wald	df	Sig.
Step	X1	.021	.041	.267	1	.605
1 ^a	X2	-.712	.699	1.037	1	.309
	X3	1.504	.497	9.164	1	.002
	X4	.256	.283	.817	1	.366
	X5	.009	.012	.553	1	.457
	X6	-.178	.186	.918	1	.338
	Constant	20.086	18.267	1.209	1	.271

Sumber: Hasil olah data SPSS 16, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, maka diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$Y = 20.086 + 0.021X_1 - 0.712X_2 + 1.504X_3 + 0.256X_4 + 0.009X_5 - 0.178X_6 + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi logistik diatas, dapat dianalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Nilai constant (α) sebesar 20,086, yang memiliki arti bahwa jika variabel independen nilainya tetap (constant),

maka nilai variabel dependen atau kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 20,086

- b. Variabel jumlah anggota DPRD (X1) memiliki nilai koefisien (β) sebesar 0,021, yang memiliki arti jika variabel jumlah anggota DPRD mengalami peningkatan 1 satuan dengan asumsi nilai variabel independen lain tetap (constant), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,021.
- c. Variabel jumlah anggaran belanja daerah (X2) memiliki nilai koefisien (β) sebesar -0,712, yang memiliki arti jika variabel jumlah anggaran belanja mengalami peningkatan 1 satuan dengan asumsi nilai variabel independen lain tetap (constant), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar -0,712.
- d. Variabel bimbingan teknis (X3) memiliki nilai koefisien (β) sebesar 1,504, yang memiliki arti jika variabel bimbingan teknis mengalami peningkatan 1 satuan dengan asumsi nilai variabel independen lain tetap (constant), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 1,504.
- e. Variabel pendidikan kepala daerah (X4) memiliki nilai koefisien (β) sebesar 0,256, yang memiliki arti jika variabel pendidikan kepala daerah mengalami peningkatan 1 satuan dengan asumsi nilai variabel independen lain tetap (constant), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,256.
- f. Variabel umur pemerintah daerah (X5) memiliki nilai koefisien (β) sebesar 0,009, yang memiliki arti jika variabel umur pemerintah daerah mengalami peningkatan 1 satuan dengan asumsi nilai variabel independen lain tetap (constant), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,009.

- g. Variabel kontrol luas daerah (X6) memiliki nilai koefisien (β) sebesar -0,178, yang memiliki arti jika variabel luas daerah mengalami peningkatan 1 satuan dengan asumsi nilai variabel independen lain tetap (constant), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar -0,178.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Parsial t

Uji parsial t digunakan untuk menguji masing-masing variabel independen yang terdiri dari jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja, bimbingan teknis, pendidikan kepala daerah, umur pemerintah daerah, dan luas daerah mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini. Terdapat kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka variabel berpengaruh parsial atau hipotesis diterima.

Tabel 4. 6 Variable in the Equation

		β	S.E.	Wald	df	Sig.
Step	X1	.021	.041	.267	1	.605
1 ^a	X2	-.712	.699	1.037	1	.309
	X3	1.504	.497	9.164	1	.002
	X4	.256	.283	.817	1	.366
	X5	.009	.012	.553	1	.457
	X6	-.178	.186	.918	1	.338
	Constant	20.086	18.267	1.209	1	.271

Sumber: Hasil olah data SPSS 16, 2023.

Berdasarkan pada Tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Variabel jumlah anggota DPRD (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,605 sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,605 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh atau H_1 tidak didukung.

- b. Variabel jumlah anggaran belanja (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,309 sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,309 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah anggaran belanja tidak berpengaruh atau H_2 tidak didukung.
- c. Variabel bimbingan teknis (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 sehingga nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,002 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel bimbingan teknis berpengaruh atau H_3 didukung.
- d. Variabel pendidikan kepala daerah (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,366 sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,366 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh atau H_4 tidak didukung.
- e. Variabel umur pemerintah daerah (X5) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,457 sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,457 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh atau H_5 tidak didukung.
- f. Variabel kontrol luas daerah (X6) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,338 sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,338 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel luas daerah tidak berpengaruh.

Tabel 4. 7 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesa	Deskriptif	β	Sig. (P-value)	Hasil
H ₁	Jumlah anggota DPRD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,021	0,605	Tidak didukung
H ₂	Jumlah anggaran belanja daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	-0,712	0,309	Tidak didukung
H ₃	Bimbingan teknis berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1,504	0,002	Didukung
H ₄	Pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,256	0,366	Tidak didukung
H ₅	Umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,009	0,457	Tidak didukung

4.4 Pembahasan Uji Hipotesis

4.4.1 Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau hipotesis pertama (H₁) tidak didukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien (β) sebesar 0,021 dan nilai

Signifikansi (*P-value*) sebesar 0,605 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alfa (α) yaitu 0,05. Sehingga berdasarkan hasil penelitian variabel jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, banyak sedikitnya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak terbukti dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori institusional, menurut peneliti jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk dalam tekanan koersif atau *coercive isomorphism* karena seharusnya semakin banyak anggota, maka akan semakin kompleks proses pengawasan dan penelitian terhadap anggaran dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah. Tetapi temuan ini tidak didukung oleh teori institusional, hal ini kemungkinan disebabkan semakin banyak jumlah anggota DPRD maka proses kerjasama dan koordinasi menjadi lebih kompleks. Keadaan ini membuat sulit untuk mengontrol kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, meskipun anggota DPRD memiliki jumlah anggota yang banyak tetapi fungsi dan perannya dari hari ke hari belum disempurnakan. Sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya dimiliki anggota DPRD tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Atau dapat dikatakan peran anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya belum maksimal dan belum bekerja secara profesional. Tidak didukungnya temuan ini kemungkinan juga disebabkan oleh anggota DPRD yang paham akan bidang akuntansi tidak banyak. Di lain hal, terjadinya peningkatan kasus korupsi di kalangan anggota DPRD juga menjadi salah satu penyebab turunnya kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Andriyan et al (2021) dimana dalam penelitian tersebut anggota DPRD dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tidak sejalan juga dengan penelitian Kusuma et al (2021) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

legislatif size (DPRD) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

4.4.2 Pengaruh jumlah anggaran belanja daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa jumlah anggaran belanja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau hipotesis kedua (H_2) tidak didukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien (β) sebesar -0,712 dan nilai Signifikansi (P -value) sebesar 0,309 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alfa (α) yaitu 0,05. Sehingga berdasarkan hasil penelitian variabel jumlah anggaran belanja daerah, besar kecilnya jumlah anggaran belanja daerah tidak terbukti dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori institusional, menurut peneliti jumlah anggaran belanja daerah termasuk dalam tekanan koersif atau *coercive isomorphism* karena seharusnya semakin besar jumlah anggaran belanja daerah maka akan meningkatkan kompleksitas pengelolaan laporan keuangan. Selain itu, jumlah anggaran belanja daerah yang besar juga dapat mencerminkan tingkat diversitas kegiatan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Tetapi, temuan ini tidak didukung oleh teori institusional karena kemungkinan besar kecilnya jumlah anggaran belanja pada pemerintah daerah tidak dialokasikan sesuai dengan rencana. Selain itu, mungkin juga pemerintah dituntut untuk memaksimalkan realisasi anggaran sehingga pemerintah lebih fokus pada bagaimana pengeluaran dapat diserap tetapi kurang fokus pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penyebab lain yaitu anggaran belanja daerah yang tinggi tidak dikelola secara efisien atau terdapat kebocoran dan penyalahgunaan anggaran sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan keinginan. Dengan anggaran yang tinggi juga dibutuhkan

dukungan oleh sumber daya manusia yang memadai untuk mengimplementasikan program yang direncanakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Aziz (2016) dimana pada hasil penelitian tersebut belanja daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Serta penelitian Priyastivi & Saputra (2019) dimana pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Puspita & Martani (2016) dimana dalam hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa belanja daerah yang tinggi tidak mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi.

4.4.3 Pengaruh bimbingan teknis terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa bimbingan teknis berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau hipotesis ketiga (H_3) didukung atau diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien (β) sebesar 1,504 dan nilai Signifikansi (P -value) sebesar 0,002 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai alfa (α) yaitu 0,05. Sehingga berdasarkan hasil penelitian variabel bimbingan teknis, dengan adanya bimbingan teknis pada aparat pemerintah daerah terbukti bahwa kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori institusional, menurut peneliti bimbingan teknis termasuk dalam tekanan mimetik atau *mimetic isomorphism* karena bimbingan teknis pada pemerintah daerah merupakan dorongan untuk menyesuaikan diri untuk mencapai target terkait laporan keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kapasitas penyusunan laporan keuangan yang lebih baik. Temuan ini

didukung oleh teori institusional, karena dengan adanya bimbingan teknis akan membantu pemerintah dalam memahami standar akuntansi yang berlaku dan proses pengujian yang disyaratkan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, dengan bimbingan teknis pemerintah daerah diberikan panduan mengenai prosedur pengungkapan keuangan dan pengelolaan transaksi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Serta, dengan bimbingan teknis dapat membantu pemerintah daerah memahami bagaimana menyusun laporan keuangan yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Taufiqurrohman & Puspita (2020) dimana bimbingan teknis keuangan terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta sejalan dengan hasil penelitian Hartati (2016) yang menunjukkan bahwa pelatihan teknis atau bimbingan teknis berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.4.4 Pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau hipotesis keempat (H_4) tidak didukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien (β) sebesar 0,256 dan nilai Signifikansi (*P-value*) sebesar 0,0366 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alfa (α) yaitu 0,05. Sehingga berdasarkan hasil penelitian variabel pendidikan kepala daerah, bahwa semakin tinggi riwayat pendidikan kepala daerah tidak terbukti dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori institusional, menurut peneliti pendidikan kepala daerah termasuk dalam tekanan normatif atau

normative isomorphism karena seharusnya semakin tinggi pendidikan seorang kepala daerah, maka akan semakin baik kemampuan dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Karena dengan pendidikan yang memadai, kepala daerah akan memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi, menginterpretasikan laporan keuangan dan membuat keputusan yang berdasarkan dari informasi yang akurat. Selain itu, kepala daerah yang memiliki pendidikan yang memadai akan lebih mampu memahami tata kelola keuangan dan mengawasi proses pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah. Tetapi temuan ini tidak didukung oleh teori institusional, dimana hasil penelitian ini pendidikan kepala daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut kemungkinan karena latar belakang pendidikan kepala daerah tidak semua berasal dari bidang akuntansi, tetapi berasal dari bidang yang lain seperti bidang hukum atau bidang pendidikan lainnya. Sehingga kurangnya kemampuan dan pemahaman dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan dengan baik atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wungow et al., (2016) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sukriani et al., (2018) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan BUMDes. Penelitian lainnya yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian Irnanta (2020) yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan yang positif terhadap kualitas akuntabilitas keuangan desa.

4.4.5 Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau hipotesis kelima (H_5) tidak didukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien (β) sebesar 0,009 dan nilai Signifikansi (P -value) sebesar 0,457 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alfa (α) yaitu 0,05. Sehingga berdasarkan hasil penelitian variabel umur pemerintah daerah, bahwa semakin lama umur pemerintah daerah tidak terbukti dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori institusional, menurut peneliti umur pemerintah daerah termasuk dalam tekanan normatif atau *normative isomorphism* karena logikanya adalah jika umur pemerintah daerah lebih lama maka akan dapat mempengaruhi tingkat kompetensi dan pemahaman dalam mengelola keuangan serta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah daripada pemerintah daerah dengan umur yang lebih baru. Karena pemerintah dengan umur daerah yang lebih lama memiliki pengalaman serta pengetahuan yang lebih banyak. Tetapi temuan ini tidak didukung oleh teori institusional, dimana dalam penelitian ini menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena pemerintah daerah dengan umur yang cenderung lama memiliki sifat monoton dalam sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah yang memiliki umur yang lebih lama mungkin tidak memperbaiki kesalahan dari temuan audit yang sebelumnya atau pemerintah daerah terus mengulangi kesalahan yang sama

dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatimah, Sari & Rasuli (2014) yang menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau terhadap penerimaan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Serta hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Simbolon & Kurniawan, 2018 dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa umur administratif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kogoya (2019) yang menunjukkan hasil bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Serta tidak sejalan dengan penelitian Setyaningrum & Syafitri (2014) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa umur administratif Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan yaitu semakin tua umur administratif Pemerintah Daerah mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan LKPD secara lengkap.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jumlah anggaran belanja daerah, bimbingan teknis, pendidikan kepala daerah dan umur pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kemungkinan karena banyak jumlah anggota DPRD maka proses kerjasama dan koordinasi menjadi lebih kompleks. Sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik.
2. Jumlah anggaran belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kemungkinan karena banyaknya jumlah anggaran belanja daerah tidak dialokasikan sesuai dengan rencana.
3. Bimbingan teknis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang artinya bahwa melalui bimbingan teknis pemerintah daerah dapat memperoleh pemahaman yang lebih mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dan prosedur dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Bimbingan teknis dapat membantu pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan standar akuntansi yang tepat, menjaga konsistensi dan keakuratan pengukuran dan pencatatan transaksi keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.

4. Pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang artinya bahwa meskipun pendidikan kepala daerah yang tinggi bisa memberikan keterampilan dasar dalam pengelolaan keuangan.
5. Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang artinya bahwa meskipun pemerintah daerah yang lebih lama mungkin memiliki pengalaman yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan, hal ini tidak menjamin bahwa laporan keuangannya lebih baik. Sama halnya dengan pemerintah daerah yang lebih baru tidak mengindikasikan bahwa laporan keuangannya akan memiliki kualitas yang lebih buruk.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna karena memiliki keterbatasan yang apabila diatasi pada penelitian selanjutnya akan dapat menyempurnakan hasil penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah data variabel penelitian dalam penelitian ini hanya bersumber dari data sekunder atau data yang diperoleh dari website resmi pemerintah daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran sebagai masukan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan DPRD untuk meningkatkan kemampuannya dengan memberikan bimbingan teknis dan pengembangan kepada anggota DPRD yang terkait dengan pemahaman akuntansi, pengeolaan keuangan dan proses pelaporan keuangan. Selain itu, DPRD dapat mendirikan atau

memperkuat unit internal audit untuk pengawasan yang efektif terhadap proses pengelolaan keuangan.

2. Dalam penyusunan anggaran belanja daerah diharapkan mengalokasikan anggaran yang memadai, selain itu diharapkan anggaran belanja daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta pemantauan, pengawasan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
3. Dengan melaksanakan bimbingan teknis yang efektif dengan pendekatan praktis dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan kualitas laporan keuangan dapat terus meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Dengan melakukan pendidikan yang tepat dan mengedepankan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah, kepala daerah dapat memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini akan membantu menciptakan transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat yang lebih baik terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
5. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel independen lainnya yang lebih potensial, seperti tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik, tingkat pengawasan dan variabel lainnya yang lebih potensial. Dengan demikian, peneliti dapat menghasilkan informasi yang lebih mendalam dan mampu untuk membandingkan kualitas laporan keuangan secara lebih komprehensif. Selain itu peneliti selanjutnya dapat mengambil sampel yang lebih banyak dan representatif, hal ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif

tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. F., (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 295-305. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Andriyan, T., Bustami, E., & Mualim, B. (2021). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkatan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(7), 44–54.
- Aziz, A. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)*. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 68-101. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>.
- Basuki, A., & Ridha, M. A. (2012). *The Impact of External Pressure, Environmental Uncertainty, and Commitment of Management on Implementation of Financial Reporting Transparency*. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 15(2).
- BPK RI. (2021). *Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Alami Peningkatan*. <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan>.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2019). *PSAK nomor 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.
- Fatimah, D., Sari, R. N., & Rasull, M. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia*. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-15.
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). *Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah*. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(2), 181-197. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartati. (2016). *Pengaruh Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Katalogis*, 4(9), 41-52.

- Irnanta, H. (2020). *Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1-8.
- Kogoya, S., Salle, A., & Wijaya, A. H. C. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD Di Pemerintah Kabupaten-Kota Di Provinsi Papua*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(2), 98-111.
- Kusuma, R., Aswar, K., & Korespondensi, P. (2021). *Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Suatu Tinjauan Empiris*. *Konferensi Riset Nasional Manajemen Akuntansi dan Ekonomi*, 2(1), 581-591.
- Meyer., John, W., Scott, W. R., & Terence, C. D. (1981). *“Institutional and Technical Sources of Organizational Structure Explaining the Structure of Educational Organizations.”* In Herman Stein (e.d), *Organizations and the Human Service: Cross-Dicsiplinary Reflections*. Philadelphia, PA: Temple University Press.
- Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mutiah, C., Wahab, & Nurudin. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan*. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223-242.
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan. (2021). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran*. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(2), 214-223.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). *Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 7(1), 56-68.
- Priyastiwi, & Saputra, N. (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan dan Karakteristik Daerah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet*. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(2), 157-172.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan*. *Al Urwatul Wutsqa*, 2(1), 1-8.
- Republik Indonesia (2003), *Undang-Undang Nomor 17, Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia (2004), *Undang-Undang Nomor 32, Tentang Pemerintahan Daerah*.

- Republik Indonesia (2004), *Undang-Undang Nomor 33, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia (2005), *Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia (2010), *Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Republik Indonesia (2014), *Undang-Undang Nomor 23, Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia (2017), *Undang-Undang Nomor 7, Tentang Pemilihan Umum.*
- Republik Indonesia (2019), *Peraturan Pemerintah Nomor 12, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Ritonga, M. F. (2014). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Latar Belakang Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Disiplin Kerja Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Undergraduate thesis, UNIMED.*
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(3), 486-719.*
- Roszkowska-Menkes, M., & Aluchna, M. (2019). *Non-financial Reporting: Conceptual Framework, Regulation and Practice.*
- Santoso, M. A. (2011). *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(4), 604-620.*
- Scott, W. R. (2008). *Approaching Adulthood: The Maturing of Institutional Theory. Springer, 37(5), 427-442.*
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2014). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154-170.*
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Kinerja, 20(2), 179-191.*

- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia*. *Modus*, 30(1), 54–70.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukriani, L., Dewi, P. E. D. M., & Wahyuni, M. A. (2018). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes Di Kecamatan Negara*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 85-97.
- Syafitri, F. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi Sarjana, FEUI, Depok.
- Taufiqurrohman, & Puspita, I. (2020). *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Bimbingan Teknis Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak*. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 155-168.
- Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1-8.
- Winarni, D., & Zamakhsyari, L. (2021). *Analisis Kualitas Informasi Akuntansi Melalui Pendekatan Teori Institusional Isomorfisme*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 37-46.
- Wungow, J. F., Lambey, L., & Pontoh, W. (2016). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 7(2), 174-188.
- Yuliani, W. S. (2021). *Pengaruh Latar Belakang Personal dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, 2(2), 903-913.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56-64.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota
1	Pidie Jaya
2	Aceh Barat
3	Aceh Tengah
4	Nias
5	Langkat
6	Karo
7	Kepahiang
8	Payakumbuh
9	Bekasi
10	Bengkalis
11	Lahat
12	Dumai
13	Pelalawan
14	Simalungun
15	Kerinci
16	Merangin
17	Batanghari
18	Batanghari
19	Musi Rawas
20	Tanggamus
21	Dairi
22	Musi Banyuasin
23	Bangka Tengah
24	Bengkulu Utara
25	Bengkulu Tengah
26	Rejang Lebong
27	Pariaman
28	Tanjungbalai
29	Sukabumi
30	Boyolali
31	Tulang Bawang
32	Pesawaran
33	Bangka

34	Belitung Timur
35	Kepulauan Mentawai
36	Banyuwangi
37	Karawang
38	Batam
39	Bintan
40	Natuna
41	Ngada
42	Tasikmalaya
43	Purwakarta
44	Ciamis
45	Sukoharjo
46	Jeneponto
47	Kupang
48	Tegal
49	Purworejo
50	Kulonprogo
51	Bantul
52	Sleman
53	Seram Timur
54	Mojokerto
55	Jember
56	Jombang
57	Sintang
58	Palangka Raya
59	Mandailing Natal
60	Lebak
61	Tangerang Selatan
62	Badung
63	Gianyar
64	Denpasar
65	Sumbawa Barat
66	Lombok Barat
67	Lombok Tengah
68	Seram Barat
69	Manggarai
70	Sumba Barat

71	Singkawang
72	Ambon
73	Bontang
74	Kayong Utara
75	Barito Selatan
76	Waropen
77	Barito Utara
78	Kepulauan Sangihe
79	Banjar
80	Tabalong
81	Tanah Laut
82	Balikpapan
83	Pegunungan Bintang
84	Paser
85	Malinau
86	Nunukan
87	Kota Tarakan
88	Minahasa Selatan
89	Intan Jaya
90	Mamasa
91	Tomohon
92	Palu
93	Banggai Kepulauan
94	Parigi Moutong
95	Bombana
96	Konawe Kepulauan
97	Wakatobi
98	Gowa
99	Tana Toraja
100	Maros
101	Halmahera Selatan
102	Pasangkayu
103	Pulau Taliabu
104	Polewali Mandar
105	Boalemo
106	Gorontalo Utara
107	Bone Bolango

108	Buru Selatan
109	Maluku Tengah
110	Kepulauan Aru
111	Pulau Morotai
112	Halmahera Barat
113	Labuhan Batu
114	Kaimana
115	Teluk Wondama
116	Sorong
117	Padang Lawas Utara
118	Jayapura
119	Mimika
120	Merauke

Lampiran 2 Jumlah Anggota DPRD

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota DPRD
1	Pidie Jaya	25
2	Aceh Barat	25
3	Aceh Tengah	30
4	Nias	25
5	Langkat	50
6	Karo	35
7	Kepahiang	25
8	Payakumbuh	25
9	Bekasi	50
10	Bengkalis	45
11	Lahat	40
12	Dumai	30
13	Pelalawan	35
14	Simalungun	50
15	Kerinci	30
16	Merangin	35
17	Batanghari	35
18	Batanghari	35
19	Musi Rawas	40
20	Tanggamus	45
21	Dairi	35
22	Musi Banyuasin	45
23	Bangka Tengah	25
24	Bengkulu Utara	30
25	Bengkulu Tengah	25
26	Rejang Lebong	30
27	Pariaman	40
28	Tanjungbalai	25
29	Sukabumi	50
30	Boyolali	45
31	Tulang Bawang	40
32	Pesawaran	45
33	Bangka	35
34	Belitung Timur	25
35	Kepulauan Mentawai	20

36	Banyuwangi	50
37	Karawang	50
38	Batam	50
39	Bintan	25
40	Natuna	20
41	Ngada	25
42	Tasikmalaya	50
43	Purwakarta	45
44	Ciamis	50
45	Sukoharjo	45
46	Jeneponto	40
47	Kupang	40
48	Tegal	50
49	Purworejo	45
50	Kulonprogo	40
51	Bantul	45
52	Sleman	50
53	Seram Timur	25
54	Mojokerto	25
55	Jember	50
56	Jombang	50
57	Sintang	40
58	Palangka Raya	30
59	Mandailing Natal	40
60	Lebak	50
61	Tangerang Selatan	50
62	Badung	40
63	Gianyar	40
64	Denpasar	45
65	Sumbawa Barat	25
66	Lombok Barat	45
67	Lombok Tengah	50
68	Seram Barat	30
69	Manggarai	35
70	Sumba Barat	25
71	Singkawang	30
72	Ambon	35

73	Bontang	25
74	Kayong Utara	25
75	Barito Selatan	25
76	Waropen	20
77	Barito Utara	25
78	Kepulauan Sangihe	25
79	Banjar	45
80	Tabalong	30
81	Tanah Laut	35
82	Balikpapan	45
83	Pegunungan Bintang	25
84	Paser	30
85	Malinau	20
86	Nunukan	25
87	Kota Tarakan	30
88	Minahasa Selatan	30
89	Intan Jaya	25
90	Mamasa	30
91	Tomohon	20
92	Palu	35
93	Banggai Kepulauan	25
94	Parigi Moutong	40
95	Bombana	25
96	Konawe Kepulauan	20
97	Wakatobi	25
98	Gowa	45
99	Tana Toraja	30
100	Maros	35
101	Halmahera Selatan	30
102	Pasangkayu	30
103	Pulau Taliabu	20
104	Polewali Mandar	45
105	Boalemo	25
106	Gorontalo Utara	25
107	Bone Bolango	25
108	Buru Selatan	20
109	Maluku Tengah	40

110	Kepulauan Aru	25
111	Pulau Morotai	20
112	Halmahera Barat	25
113	Labuhan Batu	45
114	Kaimana	20
115	Teluk Wondama	20
116	Sorong	30
117	Padang Lawas Utara	30
118	Jayapura	40
119	Mimika	35
120	Merauke	30

Lampiran 3 Jumlah Anggaran Belanja Daerah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggaran Belanja Daerah	Ln (Jumlah Anggaran Belanja Daerah)
1	Pidie Jaya	1.007.491.249.605	27,64
2	Aceh Barat	1.389.989.451.730	27,96
3	Aceh Tengah	1.407.727.620.190	27,97
4	Nias	548.234.412.562	27,03
5	Langkat	2.326.815.938.858	28,48
6	Karo	1.525.584.857.471	28,05
7	Kepahiang	782.798.810.158	27,39
8	Payakumbuh	731.041.110.447	27,32
9	Bekasi	6.113.945.828.498	29,44
10	Bengkalis	41.888.798.510	27,84
11	Lahat	2.341.721.562.074	28,23
12	Dumai	1.233.468.023.129	28,57
13	Pelalawan	1.819.764.827.632	27,84
14	Simalungun	2.560.325.720.124	28,04
15	Kerinci	1.226.594.369.105	27,90
16	Merangin	1.509.156.526.788	28,11
17	Batanghari	1.311.245.780.334	28,24
18	Batanghari	1.618.153.691.804	28,98
19	Musi Rawas	1.832.421.446.761	27,78
20	Tanggamus	1.986.842.110.894	27,44
21	Dairi	1.059.058.758.720	27,69
22	Musi Banyuasin	3.836.457.605.910	27,19
23	Bangka Tengah	848.559.576.802	27,90
24	Bengkulu Utara	1.162.597.980.782	27,89
25	Bengkulu Tengah	830.034.208.073	27,87
26	Rejang Lebong	1.055.753.788.317	27,58
27	Pariaman	671.456.170.235	27,57

28	Tanjungbalai	646.023.878.853	28,71
29	Sukabumi	1.263.174.759.953	27,74
30	Boyolali	2.389.687.724.000	27,75
31	Tulang Bawang	1.313.130.196.613	27,47
32	Pesawaran	1.291.914.682.722	28,82
33	Bangka	1.265.194.776.534	28,50
34	Belitung Timur	952.896.761.017	28,70
35	Kepulauan Mentawai	939.299.880.087	28,34
36	Banyuwangi	3.093.593.254.517	27,82
37	Karawang	1.363.552.577.944	26,96
38	Batam	2.938.893.690.414	28,46
39	Bintan	1.117.324.585.307	26,09
40	Natuna	1.123.671.637.814	28,48
41	Ngada	847.933.995.967	28,75
42	Tasikmalaya	3.300.111.437.407	27,72
43	Purwakarta	2.394.025.175.234	27,67
44	Ciamis	2.925.197.437.020	29,12
45	Sukoharjo	2.022.353.558.000	28,65
46	Jeneponto	1.211.185.472.712	28,18
47	Kupang	1.184.901.334.565	28,70
48	Tegal	510.685.660.000	28,79
49	Purworejo	2.296.267.754.042	28,82
50	Kulonprogo	213.463.828.762	28,52
51	Bantul	2.345.030.791.170	28,29
52	Sleman	3.063.792.544.726	27,59
53	Seram Timur	1.093.236.172.328	28,19
54	Mojokerto	1.042.609.617.966	28,42
55	Jember	4.448.913.815.154	27,69
56	Jombang	2.766.852.238.118	27,83
57	Sintang	1.955.265.365.302	27,29

58	Palangka Raya	1.282.200.280.151	27,55
59	Mandailing Natal	1.737.394.264.628	27,89
60	Lebak	2.920.409.223.229	27,53
61	Tangerang Selatan	3.193.509.491.949	27,68
62	Badung	3.268.403.627.706	27,47
63	Gianyar	2.438.167.474.345	27,76
64	Denpasar	1.925.695.566.384	27,32
65	Sumbawa Barat	957.523.774.656	28,17
66	Lombok Barat	1.756.995.830.973	28,43
67	Lombok Tengah	2.199.994.358.512	28,67
68	Seram Barat	1.057.575.821.585	27,96
69	Manggarai	1.219.431.496.229	28,45
70	Sumba Barat	714.186.258.032	28,01
71	Singkawang	926.182.414.137	27,91
72	Ambon	1.290.131.996.123	27,64
73	Bontang	50.177.213.881	27,58
74	Kayong Utara	900.324.197.405	27,72
75	Barito Selatan	1.054.482.966.595	27,21
76	Waropen	851.265.127.141	28,28
77	Barito Utara	1.136.361.567.256	27,49
78	Kepulauan Sangihe	974.241.004.627	28,10
79	Banjar	734.369.135.169	27,73
80	Tabalong	1.717.255.604.654	27,12
81	Tanah Laut	2.220.694.238.313	27,58
82	Balikpapan	2.826.437.016.519	28,43
83	Pegunungan Bintang	1.390.830.153.217	27,79
84	Paser	2.267.094.789.175	28,01
85	Malinau	1.455.682.046.350	27,46
86	Nunukan	1.324.433.262.440	27,09
87	Kota Tarakan	1.004.557.185.196	28,07

88	Minahasa Selatan	954.256.127.861	27,46
89	Intan Jaya	1.094.206.193.234	27,38
90	Mamasa	957.230.635.084	27,70
91	Tomohon	657.102.505.782	27,33
92	Palu	1.907.058.605.213	25,97
93	Banggai Kepulauan	865.252.216.800	27,51
94	Parigi Moutong	1.602.518.088.091	27,46
95	Bombana	1.105.775.940.974	27,55
96	Konawe Kepulauan	600.926.504.118	27,93
97	Wakatobi	948.123.824.004	27,73
98	Gowa	2.224.019.879.780	27,57
99	Tana Toraja	1.170.671.349.000	27,98
100	Maros	1.457.187.141.284	27,97
101	Halmahera Selatan	347.585.519.483	28,01
102	Pasangkayu	840.231.827.978	28,81
103	Pulau Taliabu	582.081.567.000	28,34
104	Polewali Mandar	1.547.425.280.309	27,69
105	Boalemo	843.985.669.746	27,23
106	Gorontalo Utara	775.369.731.236	24,46
107	Bone Bolango	1.072.195.750.997	28,48
108	Buru Selatan	743.084.625.119	28,32
109	Maluku Tengah	189.771.915.353	27,47
110	Kepulauan Aru	889.478.864.035	27,86
111	Pulau Morotai	839.582.467.585	28,50
112	Halmahera Barat	924.119.588.556	28,76
113	Labuhan Batu	1.352.721.197.188	27,94
114	Kaimana	1.098.733.301.065	27,80
115	Teluk Wondama	943.432.270.718	28,30
116	Sorong	1.414.211.555.787	27,88
117	Padang Lawas Utara	1.402.608.287.901	24,64

118	Jayapura	1.466.635.349.288	27,60
119	Mimika	3.255.200.976.131	27,59
120	Merauke	2.040.853.281.016	26,57

Lampiran 4 Bimbingan Teknis

No	Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis
1	Pidie Jaya	1
2	Aceh Barat	1
3	Aceh Tengah	1
4	Nias	0
5	Langkat	0
6	Karo	1
7	Kepahiang	1
8	Payakumbuh	1
9	Bekasi	1
10	Bengkalis	1
11	Lahat	1
12	Dumai	1
13	Pelalawan	0
14	Simalungun	1
15	Kerinci	0
16	Merangin	1
17	Batanghari	0
18	Batanghari	0
19	Musi Rawas	0
20	Tanggamus	0
21	Dairi	0
22	Musi Banyuasin	1
23	Bangka Tengah	0
24	Bengkulu Utara	1
25	Bengkulu Tengah	1
26	Rejang Lebong	1
27	Pariaman	1
28	Tanjungbalai	0

29	Sukabumi	1
30	Boyolali	1
31	Tulang Bawang	0
32	Pesawaran	1
33	Bangka	1
34	Belitung Timur	0
35	Kepulauan Mentawai	0
36	Banyuwangi	1
37	Karawang	1
38	Batam	1
39	Bintan	0
40	Natuna	1
41	Ngada	0
42	Tasikmalaya	1
43	Purwakarta	1
44	Ciamis	1
45	Sukoharjo	0
46	Jeneponto	0
47	Kupang	0
48	Tegal	1
49	Purworejo	1
50	Kulonprogo	1
51	Bantul	1
52	Sleman	1
53	Seram Timur	0
54	Mojokerto	0
55	Jember	0
56	Jombang	1
57	Sintang	1
58	Palangka Raya	1

59	Mandailing Natal	1
60	Lebak	1
61	Tangerang Selatan	0
62	Badung	1
63	Gianyar	1
64	Denpasar	0
65	Sumbawa Barat	0
66	Lombok Barat	1
67	Lombok Tengah	1
68	Seram Barat	0
69	Manggarai	0
70	Sumba Barat	1
71	Singkawang	1
72	Ambon	0
73	Bontang	0
74	Kayong Utara	1
75	Barito Selatan	1
76	Waropen	0
77	Barito Utara	0
78	Kepalauan Sangihe	1
79	Banjar	1
80	Tabalong	1
81	Tanah Laut	1
82	Balikpapan	1
83	Pegunungan Bintang	0
84	Paser	1
85	Malinau	1
86	Nunukan	0
87	Kota Tarakan	1
88	Minahasa Selatan	1

89	Intan Jaya	0
90	Mamasa	1
91	Tomohon	1
92	Palu	0
93	Banggai Kepulauan	0
94	Parigi Moutong	1
95	Bombana	1
96	Konawe Kepulauan	1
97	Wakatobi	0
98	Gowa	1
99	Tana Toraja	1
100	Maros	1
101	Halmahera Selatan	1
102	Pasangkayu	0
103	Pulau Taliabu	1
104	Polewali Mandar	0
105	Boalemo	1
106	Gorontalo Utara	1
107	Bone Bolango	1
108	Buru Selatan	1
109	Maluku Tengah	1
110	Kepulauan Aru	1
111	Pulau Morotai	1
112	Halmahera Barat	0
113	Labuhan Batu	1
114	Kaimana	1
115	Teluk Wondama	1
116	Sorong	1
117	Padang Lawas Utara	0
118	Jayapura	0

119	Mimika	1
120	Merauke	1

Lampiran 5 Pendidikan Kepala Daerah

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan Kepala Daerah
1	Pidie Jaya	2
2	Aceh Barat	2
3	Aceh Tengah	2
4	Nias	3
5	Langkat	2
6	Karo	1
7	Kepahiang	4
8	Payakumbuh	3
9	Bekasi	3
10	Bengkalis	3
11	Lahat	2
12	Dumai	3
13	Pelalawan	1
14	Simalungun	3
15	Kerinci	4
16	Merangin	3
17	Batanghari	2
18	Batanghari	4
19	Musi Rawas	2
20	Tanggamus	3
21	Dairi	4
22	Musi Banyuasin	3
23	Bangka Tengah	2
24	Bengkulu Utara	2
25	Bengkulu Tengah	3
26	Rejang Lebong	3
27	Pariaman	3
28	Tanjungbalai	3
29	Sukabumi	3
30	Boyolali	2
31	Tulang Bawang	3
32	Pesawaran	3
33	Bangka	3
34	Belitung Timur	2

35	Kepulauan Mentawai	3
36	Banyuwangi	2
37	Karawang	3
38	Batam	3
39	Bintan	2
40	Natuna	3
41	Ngada	3
42	Tasikmalaya	4
43	Purwakarta	2
44	Ciamis	2
45	Sukoharjo	3
46	Jeneponto	3
47	Kupang	3
48	Tegal	3
49	Purworejo	3
50	Kulonprogo	3
51	Bantul	1
52	Sleman	2
53	Seram Timur	1
54	Mojokerto	3
55	Jember	2
56	Jombang	1
57	Sintang	3
58	Palangka Raya	2
59	Mandailing Natal	1
60	Lebak	4
61	Tangerang Selatan	2
62	Badung	2
63	Gianyar	3
64	Denpasar	2
65	Sumbawa Barat	4
66	Lombok Barat	3
67	Lombok Tengah	2
68	Seram Barat	1
69	Manggarai	2
70	Sumba Barat	2
71	Singkawang	3

72	Ambon	2
73	Bontang	2
74	Kayong Utara	2
75	Barito Selatan	4
76	Waropen	1
77	Barito Utara	1
78	Kepulauan Sangihe	2
79	Banjar	2
80	Tabalong	3
81	Tanah Laut	2
82	Balikpapan	2
83	Pegunungan Bintang	3
84	Paser	2
85	Malinau	2
86	Nunukan	4
87	Kota Tarakan	3
88	Minahasa Selatan	2
89	Intan Jaya	3
90	Mamasa	3
91	Tomohon	2
92	Palu	2
93	Banggai Kepulauan	3
94	Parigi Moutong	2
95	Bombana	3
96	Konawe Kepulauan	3
97	Wakatobi	2
98	Gowa	4
99	Tana Toraja	2
100	Maros	4
101	Halmahera Selatan	1
102	Pasangkayu	2
103	Pulau Taliabu	2
104	Polewali Mandar	1
105	Boalemo	3
106	Gorontalo Utara	3
107	Bone Bolango	4
108	Buru Selatan	1

109	Maluku Tengah	4
110	Kepulauan Aru	2
111	Pulau Morotai	2
112	Halmahera Barat	3
113	Labuhan Batu	3
114	Kaimana	1
115	Teluk Wondama	3
116	Sorong	3
117	Padang Lawas Utara	3
118	Jayapura	4
119	Mimika	3
120	Merauke	3

Lampiran 6 Umur Pemerintah Daerah

No	Kabupaten/Kota	Umur Pemerintah Daerah
1	Pidie Jaya	14
2	Aceh Barat	65
3	Aceh Tengah	73
4	Nias	65
5	Langkat	65
6	Karo	75
7	Kepahiang	17
8	Payakumbuh	65
9	Bekasi	39
10	Bengkalis	63
11	Lahat	22
12	Dumai	22
13	Pelalawan	22
14	Simalungun	65
15	Kerinci	63
16	Merangin	56
17	Batanghari	73
18	Batanghari	18
19	Musi Rawas	78
20	Tanggamus	24
21	Dairi	57
22	Musi Banyuasin	65
23	Bangka Tengah	18
24	Bengkulu Utara	62
25	Bengkulu Tengah	13
26	Rejang Lebong	62
27	Pariaman	19
28	Tanjungbalai	35
29	Sukabumi	71
30	Boyolali	71
31	Tulang Bawang	24
32	Pesawaran	14
33	Bangka	21
34	Belitung Timur	18

35	Kepulauan Mentawai	22
36	Banyuwangi	71
37	Karawang	71
38	Batam	51
39	Bintan	65
40	Natuna	22
41	Ngada	63
42	Tasikmalaya	35
43	Purwakarta	53
44	Ciamis	71
45	Sukoharjo	35
46	Jeneponto	62
47	Kupang	63
48	Tegal	33
49	Purworejo	71
50	Kulonprogo	70
51	Bantul	71
52	Sleman	73
53	Seram Timur	18
54	Mojokerto	71
55	Jember	71
56	Jombang	71
57	Sintang	71
58	Palangka Raya	64
59	Mandailing Natal	23
60	Lebak	35
61	Tangerang Selatan	13
62	Badung	63
63	Gianyar	17
64	Denpasar	29
65	Sumbawa Barat	18
66	Lombok Barat	62
67	Lombok Tengah	63
68	Seram Barat	18
69	Manggarai	63
70	Sumba Barat	63
71	Singkawang	20

72	Ambon	63
73	Bontang	22
74	Kayong Utara	14
75	Barito Selatan	62
76	Waropen	19
77	Barito Utara	71
78	Kepulauan Sangihe	14
79	Banjar	71
80	Tabalong	56
81	Tanah Laut	56
82	Balikpapan	62
83	Pegunungan Bintang	19
84	Paser	34
85	Malinau	22
86	Nunukan	22
87	Kota Tarakan	24
88	Minahasa Selatan	18
89	Intan Jaya	13
90	Mamasa	19
91	Tomohon	18
92	Palu	43
93	Banggai Kepulauan	22
94	Parigi Moutong	19
95	Bombana	18
96	Konawe Kepulauan	8
97	Wakatobi	18
98	Gowa	62
99	Tana Toraja	64
100	Maros	62
101	Halmahera Selatan	18
102	Pasangkayu	18
103	Pulau Taliabu	8
104	Polewali Mandar	62
105	Boalemo	22
106	Gorontalo Utara	14
107	Bone Bolango	18
108	Buru Selatan	13

109	Maluku Tengah	63
110	Kepulauan Aru	19
111	Pulau Morotai	13
112	Halmahera Barat	18
113	Labuhan Batu	76
114	Kaimana	19
115	Teluk Wondama	18
116	Sorong	52
117	Padang Lawas Utara	14
118	Jayapura	52
119	Mimika	22
120	Merauke	52

Lampiran 7 Luas Daerah

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Ln (Luas Daerah)
1	Pidie Jaya	952	6,86
2	Aceh Barat	2.928	7,98
3	Aceh Tengah	4.454	8,40
4	Nias	853	6,75
5	Langkat	6.263	8,74
6	Karo	2.127	7,66
7	Kepahiang	64	4,15
8	Payakumbuh	80	4,39
9	Bekasi	211	5,35
10	Bengkalis	514	7,39
11	Lahat	4.362	9,50
12	Dumai	1.623	8,38
13	Pelalawan	13.409	8,12
14	Simalungun	4.372	8,94
15	Kerinci	3.355	8,67
16	Merangin	7.669	7,82
17	Batanghari	5.805	8,76
18	Batanghari	2.488	9,57
19	Musi Rawas	6.357	8,40
20	Tanggamus	4.655	7,11
21	Dairi	1.928	7,35
22	Musi Banyuasin	14.266	4,10
23	Bangka Tengah	2.156	8,39
24	Bengkulu Utara	4.425	7,15
25	Bengkulu Tengah	1.224	8,02
26	Rejang Lebong	1.550	7,83
27	Pariaman	73	8,71
28	Tanjungbalai	61	7,36
29	Sukabumi	4.146	7,18
30	Boyolali	1.081	12,48
31	Tulang Bawang	4.386	7,39
32	Pesawaran	1.278	7,90
33	Bangka	3.029	6,88
34	Belitung Timur	2.507	7,90

35	Kepulauan Mentawai	6.034	6,20
36	Banyuwangi	30	6,62
37	Karawang	1.652	6,78
38	Batam	1.575	6,94
39	Bintan	1.318	6,37
40	Natuna	264.198	6,23
41	Ngada	1.621	6,35
42	Tasikmalaya	2.709	8,66
43	Purwakarta	972	6,54
44	Ciamis	2.711	8,10
45	Sukoharjo	493	7,06
46	Jeneponto	750	8,80
47	Kupang	180	8,10
48	Tegal	879	4,99
49	Purworejo	1.035	6,04
50	Kulonprogo	586	5,91
51	Bantul	507	4,85
52	Sleman	575	7,46
53	Seram Timur	5.779	6,96
54	Mojokerto	692	6,94
55	Jember	3.293	8,85
56	Jombang	1.159	7,20
57	Sintang	21.638	6,60
58	Palangka Raya	2.853	6,22
59	Mandailing Natal	6.621	5,88
60	Lebak	3.305	8,43
61	Tangerang Selatan	147	8,86
62	Badung	419	9,29
63	Gianyar	368	9,02
64	Denpasar	128	8,45
65	Sumbawa Barat	1.742	8,18
66	Lombok Barat	1.054	8,20
67	Lombok Tengah	1.028	6,22
68	Seram Barat	6.948	9,66
69	Manggarai	1.344	8,95
70	Sumba Barat	737	10,57
71	Singkawang	504	9,56

72	Ambon	359	5,54
73	Bontang	161	7,28
74	Kayong Utara	4.568	8,27
75	Barito Selatan	7.020	4,99
76	Waropen	10.848	5,98
77	Barito Utara	8.300	7,82
78	Kepulauan Sangihe	737	8,74
79	Banjar	4.668	8,11
80	Tabalong	3.553	6,56
81	Tanah Laut	3.631	6,16
82	Balikpapan	503	7,54
83	Pegunungan Bintang	15.683	7,63
84	Paser	7.730	7,39
85	Malinau	38.974	8,02
86	Nunukan	14.248	8,00
87	Kota Tarakan	254	7,64
88	Minahasa Selatan	1.456	7,33
89	Intan Jaya	3.922	7,48
90	Mamasa	3.006	7,56
91	Tomohon	147	8,81
92	Palu	395	9,36
93	Banggai Kepulauan	2.489	8,77
94	Parigi Moutong	6.232	7,76
95	Bombana	3.316	7,64
96	Konawe Kepulauan	706	7,85
97	Wakatobi	474	9,83
98	Gowa	1.883	9,61
99	Tana Toraja	2.054	9,48
100	Maros	1.619	8,27
101	Halmahera Selatan	8.779	9,77
102	Pasangkayu	3.044	9,98
103	Pulau Taliabu	2.986	7,28
104	Polewali Mandar	2.075	7,56
105	Boalemo	1.522	4,30
106	Gorontalo Utara	1.777	6,24
107	Bone Bolango	1.915	8,38
108	Buru Selatan	6.723	8,45

109	Maluku Tengah	11.596	7,68
110	Kepulauan Aru	6.427	8,33
111	Pulau Morotai	2.337	6,99
112	Halmahera Barat	2.080	3,41
113	Labuhan Batu	2.561	7,41
114	Kaimana	18.500	5,19
115	Teluk Wondama	14.954	9,98
116	Sorong	13.075	7,96
117	Padang Lawas Utara	3.918	5,09
118	Jayapura	17.517	6,60
119	Mimika	21.694	8,01
120	Merauke	1.446	9,08

Lampiran 8 Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK)

No	Kabupaten/Kota	Opini BPK
1	Pidie Jaya	1
2	Aceh Barat	1
3	Aceh Tengah	1
4	Nias	1
5	Langkat	0
6	Karo	1
7	Kepahiang	1
8	Payakumbuh	1
9	Bekasi	0
10	Bengkalis	1
11	Lahat	1
12	Dumai	1
13	Pelalawan	1
14	Simalungun	0
15	Kerinci	1
16	Merangin	1
17	Batanghari	1
18	Batanghari	0
19	Musi Rawas	1
20	Tanggamus	1
21	Dairi	1
22	Musi Banyuasin	0
23	Bangka Tengah	1
24	Bengkulu Utara	1
25	Bengkulu Tengah	1
26	Rejang Lebong	1
27	Pariaman	1
28	Tanjungbalai	0
29	Sukabumi	1
30	Boyolali	1
31	Tulang Bawang	1
32	Pesawaran	1
33	Bangka	1
34	Belitung Timur	1
35	Kepulauan Mentawai	0

36	Banyuwangi	1
37	Karawang	1
38	Batam	1
39	Bintan	1
40	Natuna	1
41	Ngada	0
42	Tasikmalaya	1
43	Purwakarta	1
44	Ciamis	1
45	Sukoharjo	1
46	Jeneponto	0
47	Kupang	1
48	Tegal	1
49	Purworejo	1
50	Kulonprogo	1
51	Bantul	1
52	Sleman	1
53	Seram Timur	0
54	Mojokerto	1
55	Jember	0
56	Jombang	1
57	Sintang	1
58	Palangka Raya	1
59	Mandailing Natal	0
60	Lebak	1
61	Tangerang Selatan	1
62	Badung	1
63	Gianyar	1
64	Denpasar	1
65	Sumbawa Barat	1
66	Lombok Barat	1
67	Lombok Tengah	1
68	Seram Barat	0
69	Manggarai	1
70	Sumba Barat	1
71	Singkawang	1
72	Ambon	0

73	Bontang	1
74	Kayong Utara	1
75	Barito Selatan	1
76	Waropen	0
77	Barito Utara	1
78	Kepulauan Sangihe	1
79	Banjar	1
80	Tabalong	1
81	Tanah Laut	1
82	Balikpapan	1
83	Pegunungan Bintang	0
84	Paser	1
85	Malinau	1
86	Nunukan	1
87	Kota Tarakan	1
88	Minahasa Selatan	1
89	Intan Jaya	0
90	Mamasa	1
91	Tomohon	1
92	Palu	1
93	Banggai Kepulauan	0
94	Parigi Moutong	1
95	Bombana	1
96	Konawe Kepulauan	1
97	Wakatobi	1
98	Gowa	1
99	Tana Toraja	0
100	Maros	1
101	Halmahera Selatan	1
102	Pasangkayu	1
103	Pulau Taliabu	0
104	Polewali Mandar	1
105	Boalemo	1
106	Gorontalo Utara	1
107	Bone Bolango	1
108	Buru Selatan	0
109	Maluku Tengah	1

110	Kepulauan Aru	0
111	Pulau Morotai	1
112	Halmahera Barat	1
113	Labuhan Batu	0
114	Kaimana	1
115	Teluk Wondama	1
116	Sorong	1
117	Padang Lawas Utara	0
118	Jayapura	1
119	Mimika	1
120	Merauke	1

Lampiran 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
jml anggota DPRD	120	20	50	34.17	9.838
jml anggaran belanja	120	24.46	29.44	27.8492	.70588
bimbingan teknis	120	0	1	.65	.479
pendidikan kepala daerah	120	1	4	2.54	.839
umur pemda	120	8	78	41.63	23.211
luas daerah	120	3.41	12.48	7.6061	1.47465
kualitas LK	120	0	1	.80	.402
Valid N (listwise)	120				

Lampiran 10 Hasil Metode Analisis Regresi Logistik

a. Menguji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	120.788	1.200
	2	120.098	1.377
	3	120.097	1.386
	4	120.097	1.386

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 120,097

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients						
			Constant	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Step 1	1	109.339	6.313	.002	-.199	.953	.152	.005	-.116
	2	105.746	13.520	.011	-.463	1.382	.232	.008	-.174
	3	105.486	18.869	.019	-.665	1.493	.254	.009	-.180
	4	105.481	20.052	.021	-.710	1.504	.256	.009	-.178
	5	105.481	20.086	.021	-.712	1.504	.256	.009	-.178
	6	105.481	20.086	.021	-.712	1.504	.256	.009	-.178

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 120,097

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

b. Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	12.895	8	.116

c. Koefisien Determinasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	105.481 ^a	.115	.181

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

d. Analisis Regresi Logistik

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	X1	.021	.041	.267	1	.605	1.022
	X2	-.712	.699	1.037	1	.309	.491
	X3	1.504	.497	9.164	1	.002	4.500
	X4	.256	.283	.817	1	.366	1.291
	X5	.009	.012	.553	1	.457	1.009
	X6	-.178	.186	.918	1	.338	.837
	Constant	20.086	18.267	1.209	1	.271	5.289E8

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6.

Lampiran 11 Hasil Uji Hipotesis

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	X1	.021	.041	.267	1	.605	1.022
	X2	-.712	.699	1.037	1	.309	.491
	X3	1.504	.497	9.164	1	.002	4.500
	X4	.256	.283	.817	1	.366	1.291
	X5	.009	.012	.553	1	.457	1.009
	X6	-.178	.186	.918	1	.338	.837
	Constant	20.086	18.267	1.209	1	.271	5.289E8

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6.